

**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP QUICK COUNT (HITUNG  
CEPAT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020 DI KECAMATAN BINGUIS TELUK KABUNG  
KOTA PADANG SUMATERA BARAT**



**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh :**

**NISA ULKHAIRI  
NIM 2010300038**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH  
ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANG SIDIMPUAN  
2025**



**PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *QUICK COUNT* (HITUNG  
CEPAT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT  
TAHUN 2020 DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA  
PADANG SUMATERA BARAT**



**SKRIPSI**

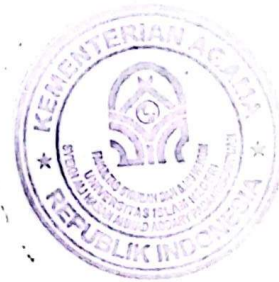
*Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh*

*Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh:**

**NISA ULKHAIRI**

**NIM 2010300038**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH**

**ALI HASAN AHMAD ADDARY**

**PADANGSIDIMPUAN**

**2025**





Hal : Skripsi  
A.n. Nisa Ulkhairi

Padangsidimpuan, 11 November 2025  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
UIN SYAHADA Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Nisa Ulkhairi yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Quick Count (Hitung Cepat) dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat*" maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** dalam bidang **Hukum Tata Negara** pada **Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan**.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang **munaqasyah** untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag.  
NIP: 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Puji Kurniawan, MA.Hk.  
NIP: 19871210 201903 1 008



## **SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisa Ulkhairi

NIM : 2010300038

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap *Quick Count* (Hitung Cepat) dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat

Dengan ini, peneliti menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti, tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan oleh pihak lain dalam skripsi ini, kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat (4) Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma serta ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, 5 November 2025

**Yang Membuat Pernyataan,**



**Nisa Ulkhairi**

NIM: 2010300038



## SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nisa Ulkhairi

NIM : 2010300038

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan hak bebas royalti non-eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul "*Persepsi Masyarakat Terhadap Quick Count (Hitung Cepat) dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat*", beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan memublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan pemegang hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenar-benarnya.

Padangsidempuan, 5 November 2025  
Yang Membuat Pernyataan



Nisa Ulkhairi  
NIM: 2010300038



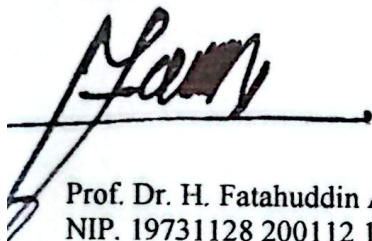


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


Nama : Nisa Ulkhairi  
NIM : 2010300038  
Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap *Quick Count* (Hitung Cepat) Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat

Ketua



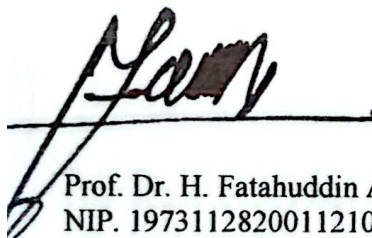
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

Sekretaris

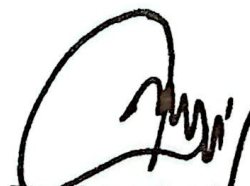


Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota



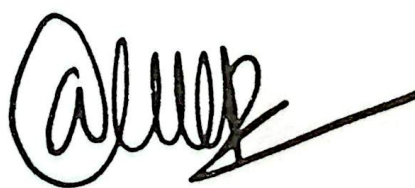
Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP. 197311282001121001



Dr. Ahmatnizar, M.Ag.  
NIP. 19680202 200003 1 005



Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A.  
NIP.19770506 200501 1 006



Agustina Damanik, M.A  
NIP.19880812 202321 2 056

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Selasa, 11 November 2025

: 09:30 WIB s/d Selesai

: 81,25 (A)

: 3.85 (Tiga Koma Delapan Lima)

: Pujian





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733

Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

---

**PENGESAHAN**

Nomor: B - 1676 /Un.28/D/PP.00.9/11/2025

Judul Skripsi : Persepsi Masyarakat Terhadap *Quick Count* (Hitung Cepat)  
Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di  
Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat

Nama : Nisa Ulkhairi

Nim : 2010300038

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H)



Padangsidempuan, 26 November 2025  
Dekan,

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.  
NIP. 197311282001121001

## ABSTRAK

**Nama** : Nisa Ulkhairi  
**Nim** : 2010300038  
**Judul** : Persepsi Masyarakat Terhadap *Quick Count* (Hitung Cepat) Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat  
**Tahun** : 2025

Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 merupakan salah satu kontestasi politik daerah yang menarik perhatian luas, baik lokal maupun nasional. Salah satu isu yang mencuat adalah penggunaan metode *quick count* (hitung cepat) untuk memberikan gambaran awal hasil pemilihan. Namun, persepsi masyarakat terhadap *quick count* berbeda-beda, dipengaruhi oleh pemahaman, kepercayaan pada lembaga survei, pengalaman sebelumnya, hingga pengaruh media. Kondisi ini menjadikan penelitian tentang persepsi masyarakat terhadap *quick count* penting, khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang memiliki karakteristik masyarakat beragam dengan keterbatasan akses informasi di sebagian wilayah.

Rumusan masalah penelitian ini difokuskan pada dua hal utama: pertama, bagaimana persepsi masyarakat terhadap hasil *quick count* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020; kedua, faktor-faktor apa saja yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap *quick count*. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi akademis dan praktis dalam meningkatkan kepercayaan publik serta transparansi pemilu di masa depan.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan kuesioner, sementara data sekunder diperoleh dari dokumen KPU, publikasi lembaga survei, serta literatur terkait. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan responden yang telah menggunakan hak pilih dan mengetahui hasil *quick count*. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan *member check*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi masyarakat Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count* bersifat beragam: 46% informan percaya pada *quick count* karena dianggap akurat dan sesuai dengan hasil KPU, 27% bersikap skeptis, dan 27% tidak memahami *quick count*. Faktor yang memengaruhi persepsi tersebut antara lain tingkat literasi politik, akses informasi, kredibilitas lembaga survei, preferensi politik, serta pengalaman pemilu sebelumnya. Penelitian ini menyarankan agar lembaga survei meningkatkan transparansi metodologi, pemerintah memperkuat literasi politik masyarakat, dan media menyajikan informasi secara netral sehingga *quick count* dapat lebih dipercaya publik sebagai instrumen demokrasi yang transparan.

**Kata kunci:** persepsi masyarakat, *quick count*, pemilihan gubernur, Sumatera Barat, Bungus Teluk Kabung.



## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Alhamdulillah Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan dan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam skripsi ini. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun Umatnya ke jalan yang benar. Skripsi ini berjudul **“PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP *QUICK COUNT* (HITUNG CEPAT) DALAM PEMILIHAN GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2020 DI KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG KOTA PADANG SUMATERA BARAT”**. Ditulis untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (UIN SYAHADA) Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kata sempurna, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa syukur, peneliti berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syahada Padangsidempuan, Bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II Bidang administrasi umum dan perencanaan keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnijar M.Ag selaku wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. H. Zul Anwar Azim Harahap M.A selaku Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Syahada Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag. Selaku Pembimbing I dan Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. Selaku Pembimbing II telah menyempatkan waktunya untuk menelaah dari Bab per Bab dalam pembuatan skripsi ini serta membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Puji Kurniawan, MA. Hk. Selaku Dosen Penasihat Akademik dan Seluruh Bapak /Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary.



6. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M.Hum. kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Kasrul dan Ibunda tersayang Rosmi Depi yang telah menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan moral maupun materil dalam setiap langkah hidup penulis.
8. Teruntuk Adik kandung saya Muhammad Deo yang memberikan support baik maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, Faizah Asyara selaku Adik Kandung yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Latifa Mulyani selaku Adik Kandung Serta semua pihak keluarga besar yang telah memberikan dukungan serta do'a.
9. Teruntuk Dicky Mulyadi, S.H. Terimakasih telah membantu serta memberikan motivasi baik berupa bantuan waktu dan fikiran terhadap peneliti dalam menyelesaikan dari tahap awal Proposal sampai dengan penelitian Skripsi ini.
10. Kepada teman-teman seperjuanganku di kelas Hukum Tata Negara 1 dan HTN 2 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, Terimakasih saya ucapkan atas dukungan, motivasi, serta saran yang kalian berikan kepada saya selaku penulis.

11. Terimakasih atas bantuan dan kerjasama semua pihak yang telah membantu dan menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Disini penulis mengucapkan rasa syukur kepada Allah Swt, karena atas karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis. Aamiin ya Robbalalamin. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada diri penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya kepada Allah penulis berserah diri atas segala usaha dan do'a dalam penyusunan skripsi ini. Semoga tulisan ini memberikan manfaat bagi kita semua.

Padangsidempuan, 10 November 2025

Penulis



Nisa Ulkhairi

2010300038



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	Je	J
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	De	D
ذ	Żal	Ž	zet (dengan titik

			di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma dengan titik terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El



م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..''..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
و	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
اِيْ	Fathah dan Ya	Ai	A dan U
اُوْ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

3. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِيْٓ	Fathah dan alif atau ya	Ā	A
اِيِٓ	Kasrah dan Ya	Ī	I
اُوِٓ	Dammah dan wau	Ū	U



### C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### D. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ٓ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya,

yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka



yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **I. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....	vi
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Batasan Istilah .....	7
D. Rumusan Masalah .....	9
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	10
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pengertian <i>Quick Count</i> .....	17
B. Teori Persepsi.....	17
C. Indikator Persepsi.....	19
D. Teori Persepsi Menurut Stuart Hall .....	20
E. Teori Kepercayaan McKnight.....	21
F. Teori Komunitas Politik.....	22
G. Teori Transparansi .....	23
H. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah.....	24
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	27
B. Jenis Penelitian .....	28
C. Subjek Penelitian .....	28
D. Sumber Data.....	30
E. Teknik Pengumpulan Data .....	30
F. Teknik Sampling.....	33
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....	34
H. Teknik Analisis Data .....	35
<b>BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Temuan Umum Hasil Penelitian.....	37
1. Sejarah <i>Quick Count</i> di Indonesia.....	37
2. Data Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 .....	41

3. Hasil <i>Quick Count</i> dan perbandingan dengan <i>Real Count</i> KPU.....	49
4. Jenis Kegiatan .....	50
5. Pengorganisasian <i>Quick Count</i> .....	52
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	57
1. Persepsi Masyarakat terhadap hasil <i>Quick Count</i> dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 .....	57
2. Faktor yang memperngaruhi persepsi masyarakat terhadap hasil <i>Quick         Count</i> dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 .....	69
3. Pengaruh Persepsi Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Terhadap Partisipasi dan Sikap Mereka Selama dan Setelah Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 .....	76
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	90



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan kepala daerah merupakan elemen penting dalam proses demokrasi di Indonesia. Pada tahun 2020, Sumatera Barat mengadakan pemilihan gubernur yang menjadi perhatian besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, *quick count* atau hitung cepat, memainkan peran signifikan sebagai salah satu metode untuk memberikan gambaran awal mengenai hasil pemilihan sebelum pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). *Quick count* dilakukan dengan mengambil sampel suara dari sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di berbagai wilayah, kemudian dihitung secara cepat dan diproyeksikan sebagai hasil keseluruhan.

Masyarakat memiliki beragam persepsi terhadap *quick count* yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk tingkat pemahaman mereka terhadap metodologi *quick count*, kepercayaan terhadap lembaga yang melakukan *quick count*, pengalaman masa lalu dengan *quick count*, serta pengaruh media dan sosial media. Persepsi masyarakat terhadap *quick count*

sangat penting karena dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan politik setelah pemilihan.<sup>1</sup>

Pada pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020, persepsi masyarakat terhadap *quick count* menjadi isu krusial. Di satu sisi, *quick count* diharapkan memberikan transparansi dan mengurangi ketegangan pasca-pemilu dengan memberikan hasil sementara yang cepat dan akurat. Di sisi lain, jika masyarakat tidak mempercayai hasil *quick count*, hal ini dapat menimbulkan kecurigaan, protes, dan potensi konflik.

Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 merupakan satu dari 4 (empat) calon pemilihan gubernur yang digelar secara serentak. Pilkada Serentak 2020 tercatat melibatkan 4 calon pemilihan gubernur, 224 Pemilihan bupati, dan 37 Pemilihan wali kota, dengan DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak lebih dari 100,3 juta orang.

Pemilihan umum merupakan pilar utama demokrasi modern yang berfungsi sebagai wadah bagi rakyat untuk menyalurkan kedaulatan politiknya. Melalui pemilu, masyarakat tidak hanya menentukan pemimpin, tetapi juga memastikan adanya mekanisme kontrol dan legitimasi terhadap pemerintahan yang terbentuk. Oleh karena itu, setiap tahapan dalam penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipercaya oleh masyarakat luas.

---

<sup>1</sup> Saiful Mujani "Persepsi Publik terhadap *Quick Count* dalam Pemilu di Indonesia" Jurnal Ilmu Politik (2017) hlm.22.

Dalam perkembangan demokrasi kontemporer, aspek penting yang banyak mendapat perhatian publik adalah bagaimana hasil pemilu dapat diketahui secara cepat. Masyarakat yang hidup di era digital memiliki kebutuhan tinggi akan informasi yang akurat dalam waktu singkat. Hal inilah yang mendorong munculnya metode *quick count* atau hitung cepat. *Quick count* dilakukan dengan teknik statistik menggunakan sampel dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang mewakili populasi pemilih. Metode ini dikenal efektif memberikan gambaran awal hasil pemilu dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, meskipun tidak bersifat resmi.

*Quick count* pada awalnya hadir untuk memberikan kejelasan dan mengurangi spekulasi terkait hasil pemilu. Di banyak negara demokrasi, *quick count* dianggap sebagai instrumen penting dalam memperkuat transparansi, mencegah manipulasi suara, serta meningkatkan partisipasi masyarakat<sup>2</sup>. Akan tetapi, dalam praktiknya, *quick count* tidak jarang memunculkan pro dan kontra. Sebagian masyarakat menganggap *quick count* memberikan informasi yang cepat dan membantu, sementara pihak lain menilai *quick count* rawan manipulasi, sarat kepentingan politik, serta berpotensi menimbulkan kebingungan jika berbeda dengan hasil penghitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU).

---

<sup>2</sup> Lili Romli, "*Quick Count dalam Pemilu di Indonesia: Antara Transparansi dan Manipulasi*," Jurnal Penelitian Politik, Vol. 12, No. 2 (2015), hlm. 119–132.



Fenomena serupa juga terjadi di Indonesia, termasuk pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Pemilu ini menjadi salah satu kontestasi politik daerah yang cukup mendapat perhatian luas, baik dari masyarakat lokal, nasional, maupun global. Sumatera Barat dikenal sebagai daerah yang memiliki dinamika politik unik, dengan karakteristik masyarakat yang religius dan kuat memegang tradisi Minangkabau. Oleh karena itu, pemilihan gubernur di daerah ini tidak hanya dipandang sebagai proses elektoral biasa, melainkan juga sebagai representasi identitas politik masyarakat Minangkabau di tingkat nasional.<sup>3</sup>

Hasil *quick count* dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020 menunjukkan adanya dinamika menarik. Di satu sisi, sebagian masyarakat menerima *quick count* sebagai acuan awal untuk mengetahui siapa kandidat yang unggul. Namun di sisi lain, tidak sedikit pula masyarakat yang menolak hasil *quick count* dengan alasan tidak percaya terhadap lembaga survei yang melaksanakannya.<sup>4</sup> Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, misalnya, ditemukan adanya perbedaan sikap: ada yang menganggap *quick count* membantu memberikan informasi awal, tetapi ada pula yang menilai hasil *quick count* hanya menimbulkan bias dan kebingungan.

---

<sup>3</sup> BBC News Indonesia, "Pemilu Daerah di Sumbar dan Persepsi Publik terhadap Quick Count," <https://www.bbc.com/indonesia>, 31 Agustus 2025, 21.10 WIB.

<sup>4</sup> Rizki Harjanto, "Dinamika Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat," *Jurnal Politik*, Vol. 6, No. 1 (2021), hlm. 55.

Pandangan kritis terhadap *quick count* juga muncul dari masyarakat global, khususnya pengamat politik dan media internasional yang menyoroti dinamika pemilu di Indonesia. Dalam beberapa laporan, pemilihan gubernur di Sumatera Barat 2020 disebut sebagai salah satu kontestasi daerah yang menarik perhatian karena menampilkan tokoh-tokoh politik dengan latar belakang yang kuat. Beberapa media internasional menyoroti bahwa proses pemilu di Sumatera Barat berlangsung relatif damai, tetapi isu kepercayaan terhadap lembaga survei dan hasil *quick count* masih menjadi persoalan serius. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *quick count* di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, belum sepenuhnya mendapat legitimasi penuh di mata publik, baik di tingkat lokal maupun global.

Kondisi ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan era modern yang ditandai dengan arus informasi serba cepat. Di satu sisi, *quick count* diharapkan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang transparan dan instan. Namun di sisi lain, ketidakpercayaan masyarakat terhadap hasil *quick count* menunjukkan adanya kesenjangan antara harapan akan transparansi data dan tingkat kepercayaan publik. Kesenjangan ini tentu perlu dikaji lebih dalam, karena jika tidak, justru berpotensi menurunkan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu itu sendiri.

Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap *quick count* pada pemilihan gubernur Sumatera Barat 2020 menjadi penting. Selain untuk memahami bagaimana masyarakat lokal,

khususnya di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, memandang *quick count*, penelitian ini juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana *quick count* dipersepsikan secara lebih luas dalam konteks demokrasi Indonesia yang terus berkembang. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya bermanfaat secara akademis, tetapi juga praktis dalam memberikan masukan bagi penyelenggara pemilu, lembaga survei, dan masyarakat global mengenai pentingnya meningkatkan kepercayaan publik terhadap mekanisme *quick count* di masa depan.

Uraian di atas yang menjadi fokus penulis dalam penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana persepsi masyarakat Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count* atau hitung cepat dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Penelitian ini mungkin akan menggali lebih dalam bagaimana masyarakat memandang hasil *quick count* selama Pilgub 2020 di Sumatera Barat, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan dan persepsi masyarakat, termasuk tingkat pemahaman terhadap metodologi *quick count*, pengaruh media, reputasi lembaga survei, serta pengalaman sebelumnya dengan *quick count* sehingga menjadi pertimbangan bagi penulis dalam menentukan judul penelitian tentang **“Persepsi Masyarakat Terhadap *Quick Count* (Hitung Cepat) Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat”**.



## B. Fokus Masalah

Penelitian ini difokuskan pada “Pemahaman terhadap persepsi masyarakat kota Padang dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.” Dengan fokus ini, penelitian akan mencoba untuk meneliti bagaimana persepsi masyarakat Bungus Teluk Kabung terhadap hasil *quick count* pada pemilihan gubernur Sumatera Barat, Sumatera Barat Tahun 2020 . Dengan mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses pemilu dimasa depan. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan gambaran tentang tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga survei yang melakukan *quick count* dan dampaknya terhadap stabilitas politik di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang.

## C. Batasan Istilah

### 1. Persepsi Masyarakat

Persepsi masyarakat merujuk pada pandangan, pemahaman, dan sikap yang dimiliki oleh warga Kota Padang terhadap *quick count* dalam konteks pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Persepsi ini dapat mencakup tingkat kepercayaan, kepuasan, dan reaksi emosional masyarakat

terhadap hasil *quick count* yang diumumkan.<sup>5</sup>

## 2. *Quick Count*

*Quick count* adalah metode perhitungan suara cepat yang dilakukan oleh lembaga survei independen dengan mengumpulkan data dari sampel Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang dipilih secara acak. Data tersebut kemudian dianalisis untuk memberikan gambaran awal hasil pemilihan sebelum pengumuman resmi keluar dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).<sup>6</sup>

## 3. Pemilihan Gubernur

Pemilihan gubernur yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pemilihan kepala daerah untuk posisi Gubernur Sumatera Barat yang dilaksanakan pada tahun 2020. Pemilihan ini melibatkan beberapa calon yang bersaing untuk menapatkan suara terbanyak dari masyarakat Sumatera Barat.<sup>7</sup>

## 4. Sumatera Barat

Kota Padang adalah ibu kota provinsi Sumatera Barat dan salah satu kota utama di provinsi ini. Dalam konteks penelitian ini. Kota Padang menjadi fokus area untuk mengkaji persepsi masyarakat terhadap *quick*

<sup>5</sup> Yetrawati, 2020, Persepsi Dan Pilihan Politik Masyarakat Kota Padang Menjelang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, <http://scholar.unand.ac.id/75341/> diakses pada 2 agustus 2024.

<sup>6</sup> Ahmad Ilham Adha, 2017, Kebebasan Pengumuman Hasil Hitung Cepat (*Quick Count*) Sebagai Bentuk Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/41525> diakses pada 2 agustus 2024.

<sup>7</sup> Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia, <https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/136> diakses pada 2 agustus 2024.

*count* dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020.<sup>8</sup>

#### D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana persepsi masyarakat kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap hasil *quick count* dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap hasil *quick count* dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020?
3. Bagaimana pengaruh persepsi masyarakat kecamatan Bungus Teluk Kabung tentang *quick count* terhadap partisipasi dan sikap mereka selama dan setelah pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020?

#### E. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengidentifikasi persepsi masyarakat kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap hasil *quick count* dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
2. Menganalisis faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap hasil *quick count* dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

---

<sup>8</sup> Alvin Gumelar Hanevi, dkk, 2022, Persepsi Masyarakat Kota Padang terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3029330&cval=14527&title=Persepsi%20Masyarakat%20Kota%20Padang%20terhadap%20Partai%20Demokrasi%20Indonesia%20Perjuangan> diakses pada 2 agustus 2024.



3. Menganalisis pengaruh persepsi masyarakat kecamatan Bungus Teluk Kabung tentang *quick count* terhadap partisipasi dan sikap mereka selama dan setelah pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

#### **F. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Bagi Akademisi**

Temuan dari penelitian ini dapat menambah literatur dan pengetahuan dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya terkait persepsi masyarakat terhadap media dan teknologi informasi dalam konteks pemilu serta menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai *quick count* dan persepsi masyarakat dalam konteks pemilihan umum.

##### **2. Bagi Peneliti**

Untuk memberikan informasi bagi lembaga survei dan penyelenggara *quick count* mengenai persepsi dan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hasil *quick count*, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas dan transparansi metode yang digunakan serta memberi wawasan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengenai persepsi masyarakat terhadap hasil *quick count*, yang dapat digunakan untuk meningkatkan proses pengawasan

dan pelaksanaan pemilu yang lebih transparan dan akuntabel.

### 3. Bagi Pemerintah

#### a. Pengambilan Keputusan yang Lebih Tepat

Hasil penelitian dapat memberikan data empiris yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk memahami persepsi masyarakat terhadap *quick count*, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait penyelenggaraan pemilu dan transparansi informasi.

#### b. Peningkatan Kualitas Pemilu

Hasil penelitian dapat menyediakan rekomendasi bagi pemerintah dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan pemilu, termasuk dalam hal metodologi *quick count*, sehingga dapat memastikan hasil yang lebih akurat dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

#### c. Pengembangan Kebijakan Publik

Hasil penelitian ini dapat menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan publik yang lebih efektif dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu dan lembaga survei yang melakukan *quick count*.

### G. Penelitian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang dipaparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa studi yang berkaitan yaitu:

1. Melakukan kajian penelitian yang berhubungan dengan “partisipasi masyarakat terhadap pemilihan umum”. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pertama, terdapat upaya dari KPUD, Partai Politik, Media masa, dan *civil society* dalam meningkatkan partisipasi politik, Kedua, rasionalitas masyarakat memberikan pengaruh yang sangat besar dalam menentukan partisipasi politik, ketiga pertimbangan ekonomi dan politik uang menjadi salah satu motivasi dalam partisipasi politik.<sup>9</sup>

Fokus pada tingkat partisipasi politik masyarakat dan faktor yang memengaruhinya. Berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian penulis tidak meneliti tingkat partisipasi, melainkan persepsi masyarakat terhadap hasil quick count pada Pilgub Sumbar 2020.

2. Melakukan dengan judul: “Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024”. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk merancang program-program pendidikan politik yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat pinggiran sungai dalam pemilu mendatang.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Tia Subekti. 2014. “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013).” *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*: 16.

<sup>10</sup> BR, E J, A Firman, F A Surbakti, dkk. 2023. “Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024.” *Hukum Dinamika*... 05(4).<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/399%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/download/399/430>.



Berbeda dengan penelitian penulis, karena lebih menekankan pada bagaimana masyarakat menilai *quick count*, bukan hanya apakah mereka ikut memilih atau tidak.

3. Melakukan studi tentang “Analisa Perspektif Kaum Milenial Kabupaten Banyumas Tentang Representasi Politik Lokal Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kabupaten Banyumas Tahun 2024”. Hasil penelitian menunjukkan representasi politik dan partisipasi politik kaum milenial dan Gen Z dalam polarisasi penggunaan media sosial.<sup>11</sup>

Fokus pada pandangan kaum milenial terhadap representasi politik lokal. Berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian penulis mencakup semua kelompok masyarakat (bukan hanya milenial), dengan fokus pada kepercayaan dan pemahaman terhadap *quick count*.

4. Melakukan studi tentang : “Kekacauan Pemilu 2019: Fenomena *Firehose of Falsehood* dalam Relasi Sikap terhadap Hoax dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Komisi Pemilihan Umum”. Hasil studi menunjukkan ada peran sikap terhadap berita hoax terhadap kepercayaan masyarakat pada KPU di Indonesia.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Bramantyo, Noorman Rafli, Oktafiani Catur , Pratiwi, Bowo , Sugiarto, and Ahmad Dan Rofiq. 2023. “View of ANALISA PERSPEKTIF KAUM MILENIAL KABUPATEN BANYUMAS TENTANG REPRESENTASI POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.Pdf.”

<sup>12</sup> Asa Akhrani, Lusy, Ika Herani, Ibnu Asqori Pohan, and Muhammad Afif Alhad. 2020. “Kekacauan Pemilu 2019: Fenomena *Firehose of Falsehood* Dalam Relasi Sikap Terhadap HOAX Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Komisi Pemilihan Umum.” *Jurnal Transformativa* 6(1): 1–27.

Berbeda dengan penelitian ini, karena penelitian penulis tidak menekankan isu hoaks, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap *quick count* dibandingkan hasil resmi KPU.

5. Melakukan penelitian dengan judul: “Pendekatan Kolaboratif Terkait Pencegahan Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Daerah”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa faktor pemicu politik identitas tersebut adalah faktor kesukuan atau dapat juga disebut dengan politik identitas etnik.<sup>13</sup>

Penelitian penulis berbeda, karena tidak menyoroti politik identitas, melainkan fokus pada bagaimana masyarakat menanggapi hasil *quick count*.

6. Mengkaji dengan judul: “Diskursus Kerukunan Sosial Masyarakat Melalui Analisis Afeksi Hasil Pemilihan Umum 2024 Menggunakan Media Sosial dan Instagram”. Hasil Penelitian ini menunjukkan perbandingan antara penggunaan media sosial dan instagram yang menunjukkan bahwa keduanya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan umum, meskipun dengan kelebihan dan karakteristik yang berbeda.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Hasanudin, Restu, M Yusuf Samad, and Heny Batara Maya. 2023. “Pemilihan Kepala Daerah (Collaborative Approaches Related To Preventing Identity Politics in Regional Head Elections).” *Jurnal Lemhannas RI* 11(2): 1–12.

<sup>14</sup> Aprilia Yola Azhari, Muhammad Ibadurrahman, Eprinda Nurro'in Habibah. 2024. “DISKURSUS KERUKUNAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI ANALISIS AFEKSI HASIL PEMILIHAN UMUM 2024 MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL X DAN INSTAGRAM.” 03(07).

Penelitian penulis berbeda, karena penelitian penulis hanya menggunakan media (TV/online) sebagai salah satu faktor yang memengaruhi persepsi *quick count*, bukan membahas kerukunan sosial.

Dengan demikian, penelitian penulis memiliki ciri khas yang membedakannya, yaitu:

- a. Fokus spesifik pada persepsi masyarakat Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count* Pilgub Sumbar 2020.
- b. Membahas faktor-faktor seperti tingkat pemahaman, kepercayaan, akses informasi, dan preferensi politik.
- c. Tidak hanya menilai partisipasi, representasi politik, atau *hoaks*, tetapi langsung pada bagaimana masyarakat menerima atau menolak *quick count* sebagai alat ukur hasil pemilu.

#### H. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas dalam penulisan skripsi ini, maka disusun dalam lima bab. Antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, fokus masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan kajian terdahulu.
2. BAB II : Tinjauan pustaka berisi tentang penelitian terdahulu dan landasan teori.
3. BAB III : Metode penelitian terdiri dari lokasi dan waktu penelitian,



jenis penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika pembahasan.

4. BAB IV : Pembahasan tentang persepsi masyarakat terhadap *quick count* (hitung cepat) dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020.
5. BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pengertian Quick Count**

Hitung cepat (*Quick Count*) adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel. Menurut Pasal 1 Butir 10 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013,<sup>15</sup> Penghitungan Cepat (*Quick Count*) hasil pemilu adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.

Berbeda dengan survei perilaku pemilih, survei prapilkada atau *survei exit poll*, hitung cepat memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi, karena hitung cepat menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden. Selain itu, hitung cepat bisa menerapkan teknik sampling proporsional sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat.

#### **B. Teori Persepsi**

Persepsi merupakan aspek penting dalam proses komunikasi dan penelitian sosial, karena menentukan bagaimana individu menafsirkan suatu realitas yang diamati. Persepsi tidak hanya bersifat pasif tetapi aktif, individu

---

<sup>15</sup> Pasal 1 Butir 10 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2013

memilih, mengorganisir, dan menafsirkan stimulus dari lingkungannya untuk menciptakan makna.

Menurut Stephen P. Robbins<sup>16</sup>, persepsi adalah proses di mana individu mengorganisir dan menafsirkan kesan inderawi mereka untuk memberikan makna terhadap lingkungan mereka.

Sementara Bimo Walgito,<sup>17</sup> mendefinisikan persepsi sebagai proses yang melibatkan masuknya stimulus melalui alat indera, yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga menimbulkan kesadaran terhadap sesuatu.

Menurut Rakhmat,<sup>18</sup> persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.

Selain itu, Slameto,<sup>19</sup> menegaskan bahwa persepsi adalah proses yang mencakup penerimaan rangsangan, pengorganisasian, dan penafsiran terhadap rangsangan tersebut untuk memberikan respon tertentu.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses psikologis yang memungkinkan individu memberikan makna terhadap suatu objek, peristiwa, atau fenomena berdasarkan pengalaman, latar belakang, dan harapan pribadi.

---

<sup>16</sup> Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), hlm.88

<sup>17</sup> Bimo Walgito, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010), hlm.99

<sup>18</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm.51.

<sup>19</sup> Slameto, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.102.



### C. Indikator Persepsi

Untuk mengukur persepsi seseorang, diperlukan indikator-indikator yang dapat diamati. Beberapa ahli mengemukakan indikator persepsi sebagai berikut:

Menurut Rakhmat dan Walgito, indikator persepsi dapat dilihat dari tiga tahapan utama:<sup>20</sup>

#### 1. Penerimaan (*Attention*)

Tahapan awal di mana individu menerima stimulus dari lingkungan melalui alat indera. Dalam konteks penelitian ini, masyarakat menerima informasi *quick count* dari media massa, media sosial, atau percakapan sosial.

#### 2. Pemahaman (*Interpretation*)

Tahapan menafsirkan dan memahami informasi yang diterima. Misalnya, apakah masyarakat menganggap *quick count* sebagai hasil ilmiah atau sekadar prediksi sementara.

#### 3. Penilaian (*Evaluation*)

Tahapan di mana individu memberikan tanggapan atau opini terhadap objek persepsi. Dalam konteks ini, masyarakat menilai apakah *quick count* dapat dipercaya atau tidak.

---

<sup>20</sup> Jalaluddin Rakhmat dan Bimo Walgito, *Indikator Persepsi* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 51.

#### 4. Respon (*Response*)

Tahapan di mana individu menunjukkan sikap atau perilaku nyata setelah membentuk persepsi, seperti menerima, menolak, atau bersikap netral terhadap hasil *quick count*.

#### D. Teori Persepsi menurut *Stuart Hall*

Dalam *Encoding/Decoding Model* menjelaskan bahwa pesan yang disampaikan melalui media tidak diterima secara sama oleh semua orang. Masyarakat sebagai khalayak akan “mendekode” pesan tersebut berdasarkan pengalaman, ideologi, dan latar sosial mereka.<sup>21</sup>

Hall membedakan tiga posisi penerimaan makna, yaitu:

1. *Dominant hegemonic position*, yaitu ketika khalayak menerima pesan sebagaimana dimaksudkan oleh pembuat pesan.
2. *Negotiated position*, yaitu ketika khalayak menerima sebagian pesan, namun juga menyesuaikannya dengan pengalaman pribadi.
3. *Oppositional position*, yaitu ketika khalayak menolak makna yang ditawarkan oleh media.

Teori ini relevan untuk menjelaskan persepsi masyarakat Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count*. Ada masyarakat yang menerima hasil *quick count* (*dominant*), ada yang ragu-ragu (*negotiated*), dan ada pula yang

---

<sup>21</sup> Hall, Stuart. “Encoding/Decoding.” Dalam *The Cultural Studies Reader*, ed. Simon During. London: Routledge, 1993.

menolak atau tidak percaya (*oppositional*). Faktor pendidikan, lingkungan sosial, dan preferensi politik turut membentuk perbedaan persepsi tersebut.

#### E. Teori Kepercayaan McKnight

McKnight dan Chervany mengembangkan *Model of Trust* yang menjelaskan bahwa kepercayaan terbentuk melalui empat komponen utama, yaitu:

1. *Integrity* (Integritas), keyakinan bahwa pihak yang dipercaya bersikap jujur dan konsisten terhadap prinsip moral.
2. *Competence* (Kompetensi), keyakinan bahwa pihak yang dipercaya memiliki kemampuan dan keahlian dalam menjalankan tugasnya.
3. *Benevolence* (Itikad baik), keyakinan bahwa pihak yang dipercaya memiliki niat baik dan tidak akan merugikan pihak lain.
4. *Predictability* (Dapat diprediksi), keyakinan bahwa tindakan pihak yang dipercaya akan konsisten dan dapat diperkirakan.<sup>22</sup>

Dalam konteks penelitian ini, masyarakat Bungus Teluk Kabung menilai kepercayaan terhadap *quick count* berdasarkan empat komponen tersebut. Misalnya, masyarakat akan percaya jika lembaga survei menunjukkan integritas (netralitas politik), kompetensi (metodologi yang ilmiah), itikad baik (tidak berpihak), serta hasilnya konsisten dengan *real count* KPU.

---

<sup>22</sup> McKnight, D. H., & Chervany, N. L. "What is Trust? A Conceptual Analysis and an Interdisciplinary Model." *Proceedings of the 2000 Americas Conference on Information Systems (AMCIS)*, 2000.



## F. Teori Komunitas Politik

Komunitas politik adalah kelompok sosial yang memiliki kesamaan kepentingan dan identitas dalam ranah politik. Dalam *The Civic Culture* menyebut komunitas politik sebagai “kelompok warga negara yang berbagi orientasi terhadap sistem politik, baik dalam bentuk kognitif, afektif, maupun evaluatif.” Dengan kata lain, komunitas politik merupakan wadah tempat masyarakat berinteraksi, berdiskusi, dan membentuk pandangan politik bersama.

Dalam konteks Kecamatan Bungus Teluk Kabung, komunitas politik tidak hanya terbentuk secara formal melalui partai politik, tetapi juga melalui kelompok sosial informal seperti pertemuan warga, komunitas nelayan, kelompok pengajian, dan organisasi kepemudaan.<sup>23</sup>

Melalui interaksi di komunitas-komunitas ini, persepsi dan kepercayaan terhadap quick count terbentuk dan menyebar. Misalnya, tokoh masyarakat yang percaya pada hasil *quick count* dapat memengaruhi pandangan warga lainnya, sehingga terbentuk opini bersama yang memperkuat atau melemahkan kepercayaan publik terhadap proses pemilu.

## G. Teori Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan dalam penyampaian informasi kepada publik agar dapat diakses, dipantau, dan dipertanggungjawabkan. Menurut Schedler (1999), transparansi adalah “ketersediaan informasi yang

---

<sup>23</sup> Hikmat, H. Strategi Pemberdayaan Masyarakat. Bandung: Humaniora Utama Press, 2004.

memadai bagi publik untuk memahami dan menilai kinerja lembaga pemerintah.” Dalam konteks pemilu, transparansi berarti keterbukaan data dan proses penghitungan suara sehingga masyarakat dapat memantau hasil secara langsung.<sup>24</sup>

*Quick count* merupakan salah satu wujud transparansi dalam demokrasi modern. Melalui publikasi hasil sementara yang cepat dan terukur, *quick count* membantu mengurangi potensi kecurangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mendorong partisipasi masyarakat. Namun, tingkat efektivitas *quick count* dalam membangun kepercayaan publik bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami metodologi dan integritas lembaga survei yang melaksanakannya.

Menurut teori sosial McKnight, kepercayaan tumbuh ketika individu merasa bahwa proses pengambilan keputusan dilakukan secara terbuka, adil, dan dapat diuji. Oleh karena itu, semakin tinggi tingkat transparansi suatu proses demokrasi termasuk *quick count*, semakin besar pula peluang meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Ferejohn, John. “Accountability and Transparency in Government.” *Public Choice*, Vol. 86, 1996.

<sup>25</sup> McKnight, D. H., & Chervany, N. L. “While Trust is Cool and Collected, Distrust is Fiery and Frenzied: A Model of Distrust Concepts.” *AMCIS Proceedings*, 2001.

## H. Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah

### 1. Definisi Fiqh Siyasah

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, siyasah adalah pengaturan urusan umat dengan hukum-hukum yang dapat membawa mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, sesuai dengan syariat Islam.<sup>26</sup>

Ibn 'Aqil juga mendefinisikan siyasah sebagai segala tindakan yang mendekatkan manusia kepada kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan, meskipun tidak ditetapkan langsung oleh Rasulullah SAW.

### 2. Fiqh Siyasah Dusturiyah

Merupakan bagian dari fiqh siyasah yang mengatur hubungan antara negara dengan warga negara, termasuk konstitusi, sistem pemerintahan, dan legitimasi politik.

Tujuannya adalah menjaga keadilan, keteraturan, dan *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) dalam penyelenggaraan negara.<sup>27</sup>

### 3. Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah

*Maslahah Mursalah*: Segala kebijakan politik harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan rakyat.

<sup>26</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kairo: Dar al-Qalam, 1978), hlm. 85.

<sup>27</sup> Ibn 'Aqil, dikutip dalam Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 12.



*Syura* (Musyawarah): Keputusan politik idealnya dihasilkan melalui musyawarah, yang dalam konteks modern dapat diwujudkan lewat pemilu.

*'Adalah* (Keadilan): Pemerintah wajib menegakkan keadilan, termasuk dalam proses pemilu, sehingga hasilnya legitimate. *Thaat wal Ta'at* (Ketaatan kepada pemimpin): Selama pemimpin sah dan tidak bertentangan dengan syariat, rakyat wajib taat. Namun legitimasi harus berasal dari proses yang adil.<sup>28</sup>

#### 4. Relevansi dengan *Quick Count* dan Pemilu

*Quick count* dapat dilihat sebagai bagian dari upaya menjaga transparansi dan *masalahah 'ammah* karena memberi kontrol terhadap hasil pemilu resmi. Dalam perspektif fiqh siyasah, *quick count* sejalan dengan prinsip hisbah (pengawasan) terhadap jalannya pemerintahan agar tidak terjadi kecurangan.

Dengan demikian, *quick count* tidak hanya fenomena politik modern, tetapi bisa dipandang sebagai mekanisme kontrol publik yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 45.

<sup>29</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 27

Q.S, Annisa Ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۝٥٨ ﴾

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.<sup>30</sup>

Qs. Annisa Ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Q.S. Annisa ayat 58.

<sup>31</sup> Q.S. Annisa ayat 59

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Pemilihan lokasi ini dilakukan karena wilayah tersebut memiliki karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari segi tingkat pendidikan, akses informasi, maupun keterlibatan dalam politik lokal. Faktor-faktor ini dianggap relevan untuk menggali persepsi masyarakat mengenai quick count dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Selain itu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung merupakan daerah yang sebagian warganya memiliki akses informasi terbatas, terutama yang tinggal di kawasan pesisir dan perbukitan. Kondisi ini memungkinkan peneliti menemukan perbedaan persepsi antara masyarakat yang mudah mengakses informasi dengan masyarakat yang akses informasinya terbatas.

Waktu penelitian berlangsung selama 1 minggu (23-30 september) sejak diterbitkannya izin penelitian. Rentang waktu ini digunakan peneliti untuk melakukan observasi awal, menyebarkan kuesioner sederhana, melakukan wawancara mendalam, serta mengumpulkan dokumen pendukung. Peneliti menyesuaikan jadwal pengumpulan data dengan



kegiatan harian masyarakat, sehingga wawancara biasanya dilakukan pada sore atau malam hari ketika responden sudah memiliki waktu luang.

## B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena peneliti ingin menggambarkan secara detail bagaimana persepsi masyarakat terhadap *quick count*.<sup>32</sup>

Dalam praktiknya, penelitian kualitatif ini tidak hanya mendeskripsikan fenomena, tetapi juga mengkaitkan data yang diperoleh di lapangan dengan konteks sosial-politik masyarakat Bungus Teluk Kabung. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyajikan data mentah hasil wawancara, tetapi juga menganalisisnya untuk menemukan pola pikir, keyakinan, serta faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap *quick count*.<sup>33</sup>

## C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung yang terlibat atau terpengaruh dalam proses Pilgub Sumbar 2020. Kriteria responden yang dipilih antara lain:

---

<sup>32</sup> Machali, Imam. 2021. *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur Metode Penelitian Kuantitatif*.

<sup>33</sup> Anselm Strauss, Juliet corbin, 2003, *Dasar-Dasar Paneltian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar), hlm 5.

1. Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilgub Sumbar 2020.
2. Mengetahui, pernah mendengar, atau mengikuti hasil *quick count* yang dipublikasikan oleh media.
3. Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah pada saat pemilihan berlangsung.
4. Bersedia memberikan informasi melalui wawancara atau kuesioner.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Masyarakat umum: pemilih laki-laki dan perempuan dengan latar belakang sosial, pendidikan, dan pekerjaan yang beragam.
2. Tokoh masyarakat: pemuka agama, pemimpin adat, atau tokoh lokal yang memiliki pengaruh dalam pembentukan opini publik.
3. Pemuda/pelajar/mahasiswa: generasi muda yang aktif menggunakan media sosial dan sering mengikuti perkembangan politik melalui internet.
4. Pemerhati pemilu di tingkat lokal: saksi partai, petugas KPPS, atau relawan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan pemilu.

Dengan variasi responden tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh tentang persepsi masyarakat terhadap *quick count*.

#### **D. Sumber Data**

Data dalam bentuk kualitatif disajikan dalam bentuk kata-kata atau gambar bukan dalam bentuk angka. Data Penelitian ini terdiri atas sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer**

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, serta kuesioner yang disebarkan kepada responden. Contohnya, peneliti mewawancarai beberapa warga di kecamatan Bungus Teluk Kabung dan tokoh masyarakat mengenai pandangan mereka terhadap *quick count*.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi dan literatur pendukung, seperti laporan Komisi Pemilihan Umum (KPU), hasil publikasi lembaga survei (*Poltracking*, *Voxpol Center*, dan lainnya), berita dari media cetak maupun online, serta penelitian terdahulu yang membahas *quick count* dan persepsi masyarakat terhadap pemilu.

Kombinasi data primer dan sekunder digunakan untuk saling melengkapi dan memperkuat hasil penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pemilihan metode penelitian harus didasarkan pada pertimbangan yang cermat terhadap tujuan penelitian, pertanyaan penelitian,



ketersediaan sumber daya, dan konteks spesifik dari penelitian tentang persepsi masyarakat pasca Pilpres terhadap Pilkada.

1. Studi Kasus: Menggunakan pendekatan studi kasus untuk mendalami persepsi masyarakat terhadap *quick count* (hitung cepat) dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat.
2. Survei: Melakukan survei dengan kuesioner terstruktur untuk mengumpulkan data dari sampel yang representatif secara statistik dari populasi yang lebih besar. Ini dapat memberikan gambaran yang lebih luas tentang persepsi dan partisipasi masyarakat.
3. Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara mendalam dengan pemilih, pejabat pemerintah daerah, atau anggota lembaga pemilihan umum untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dan partisipasi dalam Pilkada.
4. Analisis Konten Media: Menganalisis liputan media tentang Pilkada pasca Pilpres untuk memahami naratif dan framing yang digunakan dalam pemberitaan, serta bagaimana hal itu memengaruhi persepsi masyarakat.
5. Analisis Data Sekunder: Menggunakan data sekunder, seperti hasil pemilihan sebelumnya, statistik partisipasi pemilih, atau survei yang

sudah ada, untuk membandingkan dan menganalisis tren dalam partisipasi dan persepsi masyarakat.

6. Metode Campuran: Menggabungkan beberapa metode penelitian, seperti survei dengan wawancara mendalam atau analisis konten media dengan analisis data sekunder, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang fenomena yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah sebagai berikut:

1. Survei dan Kuesioner: Data dapat dikumpulkan langsung dari responden melalui survei dan kuesioner yang disebarakan secara online, melalui telepon, atau secara langsung di lapangan.
2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak dengan maksud untuk memverifikasi dan memperluas informasi yang akan dikembangkan oleh peneliti. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam, yang berarti peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan kepada narasumber, agar data yang dibutuhkan dapat terkumpul secara maksimal. Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai masyarakat setempat.

Menurut Lexy J. Moleong teknik wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara (*interview*) dengan narasumber yang diwawancarai. Data dapat diperoleh melalui wawancara mendalam dengan individu atau kelompok yang mewakili berbagai segmen masyarakat.<sup>34</sup>

1. Fokus Kelompok: Diskusi kelompok dapat menjadi sumber data yang berharga untuk memahami pandangan kolektif dan dinamika sosial terkait persepsi terhadap pilkada.
2. Analisis Media Sosial: Data dari media sosial dapat dianalisis untuk memahami tren, opini, dan percakapan yang terjadi di platform-platform seperti Twitter, Facebook, dan lainnya.
3. Dokumen dan Laporan: Analisis dokumen seperti artikel berita, laporan pemerintah, dan publikasi akademis juga dapat memberikan wawasan tentang persepsi masyarakat.

#### **F. Teknik Sampling**

Dalam Penelitian ini digunakan *Purposive Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti memilih masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, yang telah menggunakan hak pilihnya pada

---

<sup>34</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 186.



Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020. Kriteria responden adalah:

1. Warga yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.
2. Masyarakat yang mengetahui atau pernah mendengar tentang hasil quick count Pemilihan Gubernur Sumatera Barat 2020.
3. Berusia minimal 17 tahun atau sudah menikah pada saat pemilihan berlangsung.

Teknik *purposive sampling* dipilih karena peneliti ingin menggali secara mendalam persepsi masyarakat tertentu yang relevan dengan topik penelitian. Jumlah responden ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan penelitian, baik melalui kuesioner maupun wawancara mendalam, sehingga data yang diperoleh lebih terarah dan sesuai dengan fokus masalah.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengecekan keabsahan data menurut Moleong, yaitu:

##### **1. Triangulasi Sumber**

Data dibandingkan dari berbagai sumber, seperti masyarakat umum, tokoh masyarakat, dan dokumen resmi.

##### **2. Triangulasi Teknik**

Data dikumpulkan melalui berbagai metode (observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi) untuk saling melengkapi dan memperkuat.

### 3. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti berada di lapangan dalam waktu yang cukup untuk memahami konteks sosial dan politik masyarakat, sehingga data yang diperoleh lebih akurat.

### 4. Diskusi dengan Teman Sejawat (*Peer Debriefing*)

Peneliti melakukan diskusi dengan dosen pembimbing atau rekan sejawat untuk menguji konsistensi temuan penelitian.

### 5. *Member Check*

Peneliti mengonfirmasi kembali hasil wawancara kepada narasumber agar sesuai dengan maksud yang mereka sampaikan.

Dengan teknik ini, diharapkan data yang diperoleh memiliki tingkat kredibilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas yang tinggi sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

## H. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milah menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari, dan mencakup pola menemukan apa yang dipelajari dan yang dikemukakan oleh orang lain. Analisis data

kualitatif adalah data yang telah dikumpulkan, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

#### 1. Reduksi Data

Data dari wawancara, observasi, kuesioner, dan dokumentasi diseleksi dan difokuskan pada hal-hal yang relevan dengan tujuan penelitian.

#### 2. Penyajian Data

Data yang sudah direduksi disusun dalam bentuk narasi, tabel, dan kutipan wawancara untuk mempermudah pemahaman.

#### 3. Penarikan Kesimpulan

Dari data yang telah disajikan, peneliti menarik kesimpulan mengenai persepsi masyarakat terhadap *quick count*, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta implikasi sosial-politik dari persepsi tersebut.



## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. Temuan Umum Hasil Penelitian

##### 1. Sejarah *Quick Count* di Indonesia

Metode *quick count* (hitung cepat) mulai merebak ditengah air semenjak diberlakukannya pemilihan umum langsung, baik nasional maupun pemilihan kepala daerah langsung (pilkada). Metode ini dengan cepat menjadi sebuah alternatif baru yang diidolakan para pemangku kepentingan atau pihak-pihak yang terkait dengan perebutan kekuasaan baik dalam skala nasional dan dalam konteks lokal. *Quick Count* dalam ilmu statistika juga bukan barang baru. Metode ini menjadi buah bibir dikarenakan cara penggunaannya yang tidak terlalu sulit. Pengeluaran anggaran yang tidak terlalu besar serta keakuratan datanya yang dapat menyajikan informasi dengan tingkat ketepatan tinggi.<sup>35</sup>

Publik mendefinisikan *Quick Count* sebagai cara mengetahui lebih cepat siapa yang menang atau kalah dalam pemilu atau pilkada. Pada hakikatnya *Quick Count* lahir dari kebutuhan untuk menjaga agar penghitungan suara pemilu tidak dilakukan dengan cara-cara yang curang. Peluang kecurangan memang tetap ada, namun dapat diminimalisir dan diharapkan tidak merubah siapa yang seharusnya menang atau kalah.

---

<sup>35</sup> Syaiful Mujani, *Quick Count*, Direktorat LSI Sumatera Ekspres 2008.

Metode ini bertujuan, menjaga suara pemilih dan membantu agar proses pemilu berjalan secara jujur dan adil. Metode ini muncul di negaranegara yang baru membangun demokrasi pada era ahun 1980-an, misalnya di negara Eropa Timur dan Afrika. Kelemahan pada negara demokrasi yang masih baru adalah peluang kecurangan yang terbuka lebar.

Kecurangan pada saat penghitungan dan tabulasi suara sangat sering terjadi. Runtutannya pada saat di Tempat Pemungutan Suara (TPS), setelah suara dikumpulkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS) di kecamatan, sampai dengan tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Pelaksanaan *Quick Count* di tingkat TPS dan hasilnya dipublikasikan kepada khalayak/publik, maka kecurangan pasca TPS dapat dipotong. Data yang diperoleh dapat menjadi data alternatif terhadap penghitungan yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

*Quick count* atau penghitungan cepat dalam catatan di Asia Tenggara pertama dilakukan pada tahun 1986 di Pemilu Philipina. Sebuah LSM yang bernama NAMFREL melaksanakan PVT (parallel vote tabulation) yaitu pencatatan atau penabulasian secara paralel hasil penghitungan suara pemilu. Indonesia juga menggunakan metode ini era tahun 1990-an.<sup>36</sup> Metode quick count sebenarnya sudah dilaksanakan sejak pemilu 1997 dan pemilu 1999 oleh LP3ES. LP3ES sayangnya, tidak

---

<sup>36</sup> NAMFREL, *Parallel vote tabulation in the Philippines Election 1986* (Manila, NAMFREL, 1986), hlm.15.

terlalu mempublikasikan secara besar-besaran hasilnya. Seiring berjalannya waktu, teknik yang digunakan dalam *quick count* semakin berkembang.<sup>37</sup>

Prinsip dasar statistika mempermudah metode ini, penyelenggara *quick count* tidak perlu menempatkan orang di setiap TPS. LP3ES menyebutkan *quick count* atau penghitungan suara cepat adalah proses pencatatan hasil perolehan suara di ribuan TPS yang dipilih secara acak. *Quick count* adalah prediksi hasil pemilu berdasarkan fakta bukan berdasarkan opini. Karena itu ia tidak sama dengan jajak pendapat terhadap pemilih yang baru saja mencoblos atau yang biasa disebut exit poll.

Untuk kepentingan *quick count* ribuan relawan diturunkan untuk mengamati pemilu secara langsung demi memperoleh informasi yang diperlukan. Mereka mencatat ke dalam formulir yang telah disediakan mengenai informasi proses pencoblosan dan penghitungan suara di TPS yang diamati, termasuk perolehan suara masing-masing kandidat. Setelah selesai mereka akan menyampaikan temuan-temuannya ke pusat data (data center).

Mengapa kita bisa mempercayai hasil *quick count*? Pertanyaan ini seringkali diajukan ketika banyak pihak yang meragukan akurasi data. Jawabannya karena *quick count* tidak mendasarkan diri pada opini

---

<sup>37</sup> LP3ES, *Laporan Quick Count Pemilu 1999* (Jakarta : LP3ES, 1999) hlm.22.



siapapun, melainkan berbasis pada fakta lapangan, yaitu perolehan suara di TPS. Organisasi yang melakukan *Quick Count* mengumpulkan data dari tiap TPS, dan berusaha melakukan penghitungan cepat dari daerah pantauan yang dipilih secara acak. Para pemantau berada di TPS, dan melaporkan secara langsung proses pemungutan dan penghitungan surat suara.

*Quick count* dapat memperkirakan perolehan suara Pemilu secara cepat sehingga dapat memverifikasi hasil resmi KPU. Lebih jauh *quick count* mampu mendeteksi dan melaporkan penyimpangan, atau mengungkapkan kecurangan. Banyak contoh membuktikan *Quick Count* dapat membangun kepercayaan atas kinerja penyelenggara pemilu dan memberikan legitimasi terhadap proses pemilu. Selanjutnya agar kita bisa memahami *quick count*, kita pun harus mengerti metodologi dan cara penarikan sampel yang dipilih penyelenggara karena kekuatan data *quick count* sebenarnya bergantung pada bagaimana sampel itu ditarik. Sebab, sampel tersebut yang akan menentukan mana suara pemilih yang akan dipakai sebagai basis estimasi hasil pemilu. Sampel yang ditarik secara benar akan memberikan landasan kuat untuk mewakili karakteristik populasi.

Seberapa akuratkah hasil *quick count* bila dibandingkan dengan hasil resmi pemilu atau pilkada? Estimasi *quick count* akan akurat apabila mengacu pada metodologi statistik dan penarikan sampel yang ketat serta

diimplementasikan secara konsisten di lapangan. Kekuatan *Quick Count* juga sangat tergantung pada identifikasi terhadap berbagai faktor yang berdampak pada distribusi suara dalam populasi suara pemilih.

Apabila Pemilu berjalan lancar tanpa kecurangan, akurasi *quick count* dapat disandarkan pada perbandingannya dengan hasil resmi KPU. Tetapi apabila Pemilu berjalan penuh kecurangan, maka hasil *quick count* dapat dikatakan kredibel meskipun hasilnya berbeda dengan hasil resmi KPU. Oleh karena itu *Quick Count* biasanya diiringi dengan kegiatan lain yaitu pemantauan yang juga menggunakan metode penarikan sampel secara acak.

## 2. Data pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020

Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 beserta Partai Pengusungnya adalah sebagai berikut:

NO	Pasangan Calon	Partai Pengusung
1.	Mulyadi – Ali Mukhni	Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN)
2.	Nasrul Abit – Indra Catri	Partai Gerindra
3.	Fakhrizal – Genius Umar	Partai Golkar dan Partai NasDem
4.	Mahyeldi – Audy Joinaldy	Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan

	Pembangunan (PPP)
--	-------------------

Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020, mencapai angka 3.691.592 jiwa, untuk lebih jelasnya data akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:<sup>38</sup>

**Tabel 1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020**

N O	Kabupaten/ Kota	Jml Kec	Jml Desa/ Kelu- rahan	Jml TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1.	Pesisir Selatan	15	182	1.099	166.756	171.146	337.902
2.	Solok	14	74	959	131.221	134.343	265.564
3.	Sijunjung	8	61	425	77.538	78.576	156.114
4.	Tanah Datar	14	75	879	126.002	126.002	256.857
5.	Padang Pariaman	17	103	914	150.128	150.128	304.341
6.	Agam	16	82	1.377	171.127	171.127	346.130

<sup>38</sup> <https://jdih.kpu.go.id/sumbar/padang/countkepkpud52655456525535715353557a5241253344253344> Diakses pada hari rabu, tanggal 10 juli 2024 pukul 22.28 WIB.



7.	Lima Puluh Kota	13	79	796	131.211	131.211	268.757
8.	Pasaman	12	37	706	95.249	95.249	192.639
9.	Kep. Mentawai	10	43	265	30.906	30.906	59.444
10.	Dharmasraya	11	52	529	72.373	72.373	144.729
11.	Solok Selatan	7	39	461	56.066	56.066	112.250
12.	Pasaman Barat	11	19	1.034	128.883	128.883	259.329
13.	Kota Padang	11	104	1.939	301.360	301.360	615.307
14.	Kota Solok	2	13	125	24.040	24.040	48.889
15.	Kota Sawahlunto	4	37	146	23.198	23.198	46.837
16.	Kota Padang Panjang	2	16	123	19.726	19.726	40.197
17.	Kota Bukittinggi	3	24	233	37.896	37.896	77.331
18.	Kota Payakumbuh	5	47	246	46.014	46.014	93.813
19.	Kota Pariaman	4	71	177	32.257	32.257	65.162



<b>TOTAL</b>	<b>179</b>	<b>1.158</b>	<b>12.532</b>	<b>1.821.9</b>	<b>1.821.95</b>	<b>3.691.59</b>
				<b>51</b>	<b>1</b>	<b>2</b>

Dari data di atas, jumlah daftar pemilih sementara pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat adalah 615.307 orang sedangkan daftar pemilih tetap kota padang tercatat sebanyak 613.513 orang. Terdiri dari jumlah pemilih laki-laki 300.287 orang dan perempuan 313.287 orang.<sup>39</sup>

Untuk melihat lebih jelas maka penulis menyajikan perbandingan DPS Dan DPT pemilihan gubernur dan wakil gubernur sumatera barat tahun 2020 sebagai berikut:<sup>40</sup>

**Tabel 2. Perbandingan DPS dan DPT**

NO	DATA PEMILIH	JUMLAH
1.	Data Kependudukan dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)	650,066
2.	Daftar Pemilih Sementara (DPS)	615,307
3.	Daftar Pemilih Tetap (DPT)	613,513
4.	Daftar Pemilih Tambahan-2 (DPTb-2)/ pengguna KTP atau identitas kependudukan lainnya	2,589

<sup>39</sup> Wawancara dengan ketua KPU Kota Padang Riki Eka Putra padang pada tanggal 30 juni 2024 pukul 14.00 WIB.

<sup>40</sup> <http://scholar.unand.ac.id/466280/> Diakses pada hari kamis, tanggal 10 juli 2024 pukul 21.27 WIB.

5.	Persentase Pemilih Tambahan dengan DPT	0,42%
6.	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	52,34%

Rekapitulasi hasil perolehan perhitungan suara pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 tingkat kota Padang sebagai berikut.<sup>41</sup>

**Tabel 3. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Untuk Pasangan Calon Nomor urut 1: Mulyadi-Ali Mukhni**

NO	Kecamatan	Jumlah Suara
1.	Bungus Teluk Kabung	1.664
2.	Kototangah	8.922
3.	Kuranji	8.079
4.	Lubukbegalung	3.976
5.	Lubukkilangan	2.283
6.	Nanggalo	2.118
7.	Padang Barat	1.444
8.	Padang Selatan	2.984
9.	Padang Timur	3.353
10.	Padang Utara	1.858

<sup>41</sup> <https://padek.jawapos.com/politik/2363740287/partisipasi-pemilih-di-padang-52mahyeldiaudy-unggul-4825-suara> Diakses pada hari Kamis, tanggal 10 Juli 2024 pukul 21.23 WIB.

11.	Pauh	2.588
<b>TOTAL</b>		<b>39.269 suara</b>

**Tabel 4. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Untuk Pasangan Calon Nomor  
urut 2: Nasrul Abit-Indra Catri**

NO	Kecamatan	Jumlah Suara
1.	Bungus Teluk Kabung	4.139
2.	Koto tangah	17.114
3.	Kuranji	17.450
4.	Lubuk begalung	13.291
5.	Lubuk kilangan	4.520
6.	Nanggalo	5.219
7.	Padang Barat	4.594
8.	Padang Selatan	6.727
9.	Padang Timur	7.005
10.	Padang Utara	5.420
11.	Pauh	7.503
<b>TOTAL</b>		<b>92.982 suara</b>

**Tabel 5. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Untuk Pasangan Calon Nomor  
urut 3: Fakhrizal-Genius Umar**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Suara</b>
1.	Bungus Teluk Kabung	1.181
2.	Koto tengah	7.224
3.	Kuranji	3.748
4.	Lubuk begalung	3.939
5.	Lubuk kilangan	2.239
6.	Nanggalo	2.500
7.	Padang Barat	1.886
8.	Padang Selatan	2.266
9.	Padang Timur	2.580
10.	Padang Utara	2.259
11.	Pauh	1.895
<b>TOTAL</b>		<b>31.717 suara</b>



**Tabel 6. Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil  
Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Untuk Pasangan Calon Nomor  
urut 4: Mahyeldi-Audy**

<b>NO</b>	<b>Kecamatan</b>	<b>Jumlah Suara</b>
1.	Bungus Teluk Kabung	2.972
2.	Kototangah	32.550
3.	Kuranji	23.787
4.	Lubuk begalung	20.430
5.	Lubuk kilangan	10.041
6.	Nanggalo	11.337
7.	Padang Barat	7.074
8.	Padang Selatan	9.671
9.	Padang Timur	14.442
10.	Padang Utara	10.473
11.	Pauh	9.964
<b>TOTAL</b>		<b>152.741 suara</b>

Berdasarkan data di atas, maka jumlah suara keseluruhan adalah 316.709 suara sedangkan jumlah pemilih yang datang ke TPS sebanyak 321.093 orang dari jumlah DPT 613.513 orang, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil

gubernur Sumatera Barat tahun 2020 adalah 52%. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap *quick count* maka penulis akan menyediakan kuisioner dalam lembaran terpisah.

### 3. Hasil *Quick Count* dan perbandingan dengan *Real Count* KPU

Beberapa lembaga survey seperti *Poltracking* dan *Voxpol Center* melakukan *Quick Count* pada pilgub sumatera barat tahun 2020. Hasil *Quick Count* menunjukkan pasangan Mahyeldi-Audy Joinaldy unggul dengan sekitar 32-33% suara, diikuti Nasrul Abit-Indra sekitar 30%, Mulyadi-Ali Mukhni sekitar 26% dan Fakhrizal-Genius Umar sekitar 10%.<sup>42</sup>

Sementara itu, hasil *Real Count* KPU menunjukkan angka yang sangat dekat dengan hasil *Quick Count* tersebut. Perbedaan hanya sekitar 0,1%-0,3%. Hal ini menunjukkan *Quick Count* cukup akurat dalam memprediksi hasil pemilu.

**Tabel 7. Perbandingan *Quick Count* dan *Real Count* KPU**

Pasangan Calon	Hasil <i>Quick Count</i> (%)	Hasil Resmi KPU (%)	Selisih (%)
Mahyeldi – Audy Joinaldy	32,8	32,9	0,1
Nasrul Abit – Indra Catri	30,3	30,1	0,2

<sup>42</sup> Lembaga Survei *Poltracking* dan *Voxpol Center* Tahun 2020.

Mulyadi – Ali mukhni	26,2	26,1	0,1
Fakhrizal – Genius Umar	10,5	10,6	0,1

#### 4. Jenis Kegiatan

##### a. *Quick Count*

*Quick Count* adalah perhitungan suara di ratusan atau ribuan (untuk Pemilu Presiden) TPS yang dipilih secara acak. Dalam 3-4 jam setelah penghitungan di TPS, bisa diketahui hasilnya. *Quick Count* bisa secara cepat memprediksi hasil perolehan suara karena *Quick Count* memakai sampel pemilih yang terkumpul dalam satuan TPS. *Quick Count* teruji keandalannya dalam memprediksi hasil Pemilu Presiden secara nasional karena metodenya terpercaya. Kunci keberhasilan *Quick Count* adalah pada sampel TPS yang diambil.<sup>43</sup>

##### b. *Exit Poll*

Exit Poll adalah survey yang dilakukan terhadap pemilih. Bila *Quick Count* dilakukan semata-mata untuk penghitungan hasil pemilu secara cepat, maka Exit Poll memiliki 3 fungsi sekaligus, yakni:<sup>44</sup>

- 1) Memprediksi perolehan suara dalam pemilu,

<sup>43</sup> Lembaga Survei Indonesia, *Panduan Penelitian Quick Count dan Exit Poll* (Jakarta: LSI Press, 2019), hlm. 23.

<sup>44</sup> Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, "Panduan Pelaksanaan *Quick Count* dan *Exit Poll* Dalam Pemilu." Diakses pada 7 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB.

- 2) Mampu memetakan pola dukungan pemilih terhadap partai, capres maupun isu nya, serta
- 3) Mampu memberikan kontribusi yang luas bagi kebutuhan penelitian akademis.

Exit Poll dilakukan pada saat proses pemilihan di TPS masih berlangsung dan begitu penghitungan di TPS hendak dilakukan, Exit Poll sudah selesai dilakukan. Obyek amatan: Untuk *Quick Count* obyeknya adalah TPS, sedangkan Exit Poll adalah pemilih. Bila *Quick Count* menseleksi 2000 TPS, untuk Exit Poll di setiap TPS diseleksi 2 pemilih secara random.

#### c. *News Feeding*

News feeding merupakan menu pengiriman berita singkat yang disediakan dalam aplikasi *Quick Count* Puslitbangdiklat LPP RRI berkenaan dengan cara pengiriman informasi yang bernilai berita sekitar pemilu untuk disampaikan kepada publik. Muatan *news feeding* dapat berisi kegiatan seputar pelaksanaan pemungutan suara di TPS, berupa pengiriman informasi bernilai berita dalam bentuk kata dan bisa disertai foto. *News feeding* dilakukan oleh relawan baik sebelum



pelaksanaan, saat pelaksanaan dan pasca pelaksanaan pemungutan suara di TPS.<sup>45</sup>

## 5. Pengorganisasian *Quick Count*

### a. Pelaksanan *Quick Count*

Pelaksanaan *Quick Count* yang dilakukan RRI pada periode Pemilu 2014 meliputi :<sup>46</sup>

- 1) *Quick Count* Pemilu Legislatif yang telah diselenggarakan RRI pada tanggal 9 April 2014.
- 2) *Quick Count* Pemilihan Presiden diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014.

### b. Sistem Organisasi

- 1) Penyelenggaraan *Quick Count* dipimpin oleh Kepala Puslitbangdiklat LPP RRI selaku penanggung jawab atas semua kegiatan *Quick Count*.
- 2) Kepala Satker RRI dan Koordinator lapangan bertugas merekrut relawan di lapangan, bertugas melaksanakan *Quick Count* di daerah masing-masing.
- 3) Relawan adalah orang yang bertugas mendata dengan cermat hasil perhitungan suara di TPS yang telah divalidasi oleh KPPS dan para

<sup>45</sup> Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), *Pedoman Pelaksanaan Quick Count Puslitbangdiklat RRI pada Pemilu 2014*, (Jakarta: Puslitbangdiklat LPP RRI, 2014), hlm.23.

<sup>46</sup> Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), *Laporan Hasil Quick Count Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014* (Jakarta: Puslitbangdiklat LPP RRI, 2014), hlm. 15.

saksi. Relawan mengirim data hitung cepat di TPS amatan ke pusat data (*Media Center*).

#### c. Pemetaan TPS Amatan

Dalam memilih TPS diterapkan teknik ilmiah untuk memilih 2000 TPS amatan. Prinsip ilmiah bisa diterapkan bila teknik pengambilan sampel memenuhi prinsip probabilitas. Prinsip ini dilakukan dengan cara mengambil sample dengan azas keacakan (*randomness*), setiap elemen atau unsur dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk terpilih menjadi sampel. Dengan kata lain penarikan sampel dengan pendekatan probabilitas adalah suatu cara penarikan sampel yang menempatkan elemen atau unit yang terpilih berdasarkan “hukum kebetulan”.

Agar sampel acak itu bisa diterapkan, dibutuhkan kerangka sampel atau daftar nama dari unit sampel. Karena unit sampel dalam quick count adalah TPS (Tempat Pemungutan Suara), maka kerangka sampelnya adalah daftar nama semua TPS secara nasional yakni sebanyak 545.803 TPS pada waktu Pileg. Sedangkan pada saat Pilpres jumlah TPS berkurang 66.620 menjadi 478.685.

Karena kerangka sampel dalam pileg dan pilpres tersebut tidak bisa didapat langsung secara utuh dari KPU, maka tim mengumpulkan secara manual data yang tersedia dari KPU yakni Data Pemilih Tetap

(DPT) yang di dalamnya terdapat keterangan tentang TPS di mana pemilih tersebut melakukan pemungutan suara.

Karakteristik kerangka sampel yang baik:

- 1) Komprehensif Kerangka sampel tersebut komprehensif yakni memasukkan semua anggota populasi sasaran, dalam hal ini TPS. Kerangka sampel itu memuat satu demi satu TPS yang ada di wilayah yang akan melangsungkan pemilu legislatif atau pemilu Presiden.
- 2) Probabilitas Kerangka sampel yang baik juga harus menjamin setiap anggota populasi (dalam hal ini TPS) yang masuk dalam daftar itu mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Ini berarti tidak boleh ada TPS yang tercatat lebih dari sekali.
- 3) Efisien Kerangka sampel yang baik juga harus efisien, mudah didapatkan dan tidak membutuhkan biaya dan tenaga besar untuk mendapatkannya.

Setelah didapatkan kerangka sampel TPS nasional, selanjutnya dilakukan pemetaan terlebih dahulu untuk menentukan jumlah TPS di masing-masing provinsi. Sedangkan proporsi prosentase jumlah TPS di tingkat provinsi seiring dengan jumlah pemilih tetapnya.

Setelah diketahui jumlah TPS yang harus di pilih di tiap provinsi, selanjutnya dilakukan teknik acak sistematis. Teknik acak sistematis tersebut dilakukan dengan: menentukan interval sampel;

memilih secara random awal/pertama; memilih secara acak (random) sampel selanjutnya.

d. Pendesainan Sistem Teknologi Informasi *Quick Count*

Rancangan aplikasi berbasis android merupakan teknologi yang dirancang khusus oleh RRI sebagai aplikasi canggih untuk pengiriman data dan informasi dari setiap TPS amatan. Desain sistem IT dalam *Quick Count* berbasis android telah diterapkan pada *Quick Count* Pileg dan merupakan keniscayaan untuk diterapkan kembali dalam *Quick Count* Pilpres. Smartphone android menjadi perangkat utama bagi pelaksana *Quick Count* RRI. Detail pemanfaatan fungsi IT secara teknis dipaparkan dalam BAB III.

e. Penyelenggaraan Workshop

Penyelenggaraan Workshop *Quick Count* Pilpres dilakukan oleh Tim *Quick Count* Pusat. Workshop tersebut dilaksanakan di RRI Palembang, RRI Bandar Lampung, RRI Pekanbaru, RRI Medan, RRI Makassar, RRI Jayapura, RRI Mataram, RRI Denpasar, RRI Banjarmasin, RRI Semarang, RRI Yogyakarta, RRI Surabaya, RRI Bandung, RRI Jakarta, dan RRI SP Banten. Jadwal pelaksanaan workshop terlampir.

Tujuan Workshop Daerah adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan serta membangun sistem organisasi *Quick Count* yang tangguh.



Peserta Workshop Daerah *Quick Count* adalah:

- 1) Koordinator lapangan bertindak sebagai Coach mentor transfer ilmu dari hasil workshop kepada relawan;
- 2) Kerabat Kerja pendukung;
- 3) Relawan dipilih oleh koordinator lapangan dengan kriteria sebagai berikut :
  - a) Mampu bekerja secara Jujur
  - b) Sehat secara Jasmani dan rohani
  - c) Wajib menjaga Integritas dan Nama baik Lembaga RRI
  - d) Bukan berasal dari kepengurusan pihak pihak yang menjadi peserta Pemilu Presiden.
  - e) Menggunakan Handphone/Smartphone Android.
  - f) Mengenali lokasi TPS amatan sesuai mapping *Quick Count*.
  - g) Bersedia menanda tangani Surat Pernyataan relawan *Quick Count* LPP RRI yang telah disiapkan oleh Korlap (contoh surat terlampir).

Pada tahapan pelatihan Relawan *Quick Count* ini dilakukan:

- 1) Transfer hasil workshop oleh Korlap tentang Sistematika *Quick Count* dan tata cara kerja Relawan di TPS amatan;
- 2) Uji coba aplikasi *Quick Count*;
- 3) Disamping itu juga dilakukan pendistribusian logistik kepada Relawan *Quick Count* berupa perlengkapan Relawan antara lain:

- a) Buku Juknis *Quick Count* Pilpres;
- b) Surat Penugasan;
- c) Surat Pernyataan Relawan;
- d) *Name tage*;
- e) Kartu Asuransi Relawan;
- f) Akreditasi dari KPU;
- g) Form Rekap Manual Count Pilpres (form disediakan).

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

Berikut adalah temuan khusus hasil penelitian dan analisis persepsi masyarakat terhadap *quick count* dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung:

### **1. Persepsi Masyarakat terhadap Hasil *Quick Count* dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat**

Persepsi masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count* dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 memperlihatkan variasi yang cukup kompleks.<sup>47</sup> Dari hasil wawancara mendalam dengan 11 orang informan yang berasal dari berbagai latar belakang (tokoh masyarakat, pemuda, nelayan, pedagang, ASN, ibu rumah tangga, serta generasi tua), terlihat adanya perbedaan pandangan yang cukup tajam. Secara umum, *quick*

---

<sup>47</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Rakyat: Analisis Hasil Quick Count Pemilu Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 88.

*count* dipandang sebagai informasi awal yang bermanfaat untuk mengetahui gambaran sementara hasil pemilihan, meskipun masyarakat tetap menempatkan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai dasar legitimasi yang sah.

Dari 11 orang informan tersebut, terdapat 5 orang (46%) yang menyatakan percaya pada *quick count*, 3 orang (27%) yang masih ragu atau bersikap skeptis, serta 3 orang (27%) yang mengaku tidak memahami apa itu *quick count*. Berikut adalah hasil wawancara yang mewakili setiap kategori tersebut.

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung memersepsikan hasil *quick count* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, perlu dijelaskan indikator-indikator yang menjadi dasar terbentuknya persepsi tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, persepsi masyarakat terhadap *quick count* dapat dianalisis melalui tiga indikator utama, yaitu pengetahuan, sikap, dan penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap hasil *quick count*.

#### a. Pengetahuan Masyarakat tentang *Quick Count*

Pengetahuan merupakan aspek kognitif yang sangat berpengaruh dalam membentuk persepsi.<sup>48</sup> Semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu objek, semakin rasional dan objektif pandangan yang dimilikinya.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat yang berpendidikan menengah ke atas memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai konsep *quick count*. Mereka memahami bahwa *quick count* merupakan metode ilmiah berbasis sampel yang dilakukan oleh lembaga survei independen dengan tujuan untuk memberikan gambaran awal hasil pemilu secara cepat.<sup>49</sup>

Namun demikian, masih terdapat sebagian masyarakat yang memiliki pemahaman terbatas, bahkan keliru, terhadap makna *quick count*. Beberapa informan menganggap *quick count* adalah hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), bukan hasil perhitungan cepat yang bersifat sementara.

Perbedaan tingkat pengetahuan ini menunjukkan bahwa akses informasi dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh besar terhadap pemahaman masyarakat. Masyarakat yang sering mengikuti

---

<sup>48</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2018), hlm.135.

<sup>49</sup> Hasil wawancara peneliti dengan responden masyarakat pada tanggal 23 Agustus 2024 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat



perkembangan berita politik dan media massa umumnya memiliki pengetahuan lebih baik dibandingkan dengan mereka yang kurang terpapar informasi.

Pengetahuan masyarakat ini juga terbentuk dari pengalaman mereka terhadap *quick count* pada pemilu-pemilu sebelumnya. Bagi mereka yang telah melihat bahwa hasil *quick count* sering kali sejalan dengan hasil resmi KPU, pengetahuan tersebut memperkuat keyakinan bahwa metode ini valid dan dapat dipercaya. Sebaliknya, bagi masyarakat yang kurang memahami metodologi atau pernah mendengar perbedaan antara hasil *quick count* dan *real count*, mereka cenderung meragukan hasil yang disajikan.<sup>50</sup>

#### b. Sikap Masyarakat terhadap *Quick Count*

Sikap merupakan komponen afektif dari persepsi yang mencerminkan pandangan, perasaan, dan penilaian seseorang terhadap objek yang diamati.<sup>51</sup> Dalam konteks penelitian ini, sikap masyarakat terhadap *quick count* terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sikap positif, sikap netral atau ragu, dan sikap negatif.

Sikap positif ditunjukkan oleh masyarakat yang menganggap *quick count* sebagai alat transparansi yang membantu masyarakat

<sup>50</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU), "Panduan Resmi Pelaksanaan *Quick Count*" Diakses pada 10 September 2025 <https://www.kpu.go.id>

<sup>51</sup> Miftah Thoha, *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.112.

mengetahui hasil sementara pemilu dengan cepat. Kelompok ini menilai *quick count* sebagai bukti kemajuan teknologi informasi dan sebagai bentuk partisipasi publik dalam mengawasi hasil pemilu.

Mereka berpendapat bahwa hasil *quick count* biasanya akurat dan dapat dipercaya karena metode yang digunakan bersifat ilmiah. Sikap netral atau ragu ditunjukkan oleh masyarakat yang bersikap hati-hati dalam menerima hasil *quick count*.<sup>52</sup> Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, (Diana, 27 tahun, guru honorer), yang menyatakan: “Menurut saya *quick count* itu bagus untuk tahu hasil sementara, tapi saya tetap nunggu KPU biar yakin. Kadang hasilnya beda tipis, jadi saya lebih percaya kalau sudah resmi.”

Mereka menilai bahwa hasil *quick count* memang bermanfaat, tetapi belum dapat dijadikan dasar yang sah untuk menentukan pemenang pemilu. Sikap ini muncul karena sebagian masyarakat masih kurang memahami metodologi yang digunakan lembaga survei, serta adanya pengalaman bahwa hasil *quick count* tidak selalu sama dengan hasil resmi KPU.

Sikap negatif ditunjukkan oleh sebagian kecil masyarakat yang menilai *quick count* dapat menimbulkan kebingungan di tengah

---

<sup>52</sup> Burhanuddin Muhtadi, *Survei Opini Publik dan Quick Count Metodologi dan Etika* (Yogyakarta: UGM Press, 2020), hlm.67.

masyarakat. Kelompok ini beranggapan bahwa pengumuman hasil *quick count* sebelum hasil resmi dari KPU berpotensi menimbulkan perpecahan atau ketidakpercayaan terhadap proses pemilu. Seperti yang diungkapkan oleh informan lain, (Siti, 45 tahun, ibu rumah tangga): “Kalau menurut saya *quick count* malah bikin bingung. Kadang di TV ini bilang beda sama yang itu, jadi masyarakat bisa salah paham. Saya lebih percaya tunggu KPU saja.”

Masyarakat dengan sikap negatif terhadap *quick count* umumnya memiliki tingkat literasi politik yang rendah dan lebih mudah dipengaruhi oleh opini sosial di lingkungan sekitar.

Sikap-sikap ini memperlihatkan bahwa pemahaman dan pengalaman yang berbeda dapat menghasilkan perbedaan dalam menilai validitas dan manfaat *quick count*. Dengan demikian, sikap masyarakat menjadi refleksi dari sejauh mana mereka memahami dan mempercayai lembaga survei serta media yang menyampaikan hasil tersebut.

#### c. Penerimaan atau Penolakan terhadap Hasil *Quick Count*

Aspek terakhir dari indikator persepsi adalah penerimaan atau penolakan masyarakat terhadap hasil *quick count*. Penerimaan berarti masyarakat mempercayai dan mengakui hasil *quick count* sebagai gambaran awal yang valid mengenai hasil pemilihan, sementara penolakan berarti masyarakat menolak untuk mempercayai hasil

tersebut karena berbagai alasan, seperti kurangnya pemahaman, ketidakpercayaan terhadap lembaga survei, atau perbedaan preferensi politik.<sup>53</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat yang menerima hasil *quick count* adalah mereka yang memiliki tingkat pengetahuan dan kepercayaan tinggi terhadap lembaga survei. Mereka beranggapan bahwa *quick count* telah terbukti akurat karena sering kali hasilnya mendekati hasil resmi dari KPU. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan, (Imran, 32 tahun, karyawan swasta), yang menyatakan: “Saya percaya hasil *quick count* karena dari pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya, hasilnya hampir sama dengan KPU. Jadi menurut saya metode ini bisa dipercaya.”

Sebaliknya, masyarakat yang menolak hasil *quick count* cenderung berasal dari kelompok yang kurang memahami metode ilmiah di balik perhitungan tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh informan lain, (Yuliani, 42 tahun, pedagang): “Saya kurang percaya *quick count*, soalnya kadang berbeda-beda hasilnya di televisi. Saya lebih yakin nunggu pengumuman resmi dari KPU saja.”

Penolakan juga kerap muncul dari kelompok masyarakat yang merasa calon yang didukungnya kalah dalam hasil *quick count*,

---

<sup>53</sup> Littlejohn & Foss, *Theories Of Human Communication*, (California: Wadsworth Publishing, 2009), hlm.224.



sehingga menimbulkan keraguan terhadap validitas data.<sup>54</sup> Selain itu, pengaruh media juga memainkan peranan besar dalam membentuk penerimaan atau penolakan ini. Masyarakat yang aktif mengikuti berita dari media online dan televisi nasional lebih mudah menerima hasil *quick count* dibandingkan dengan mereka yang hanya mendapatkan informasi dari media sosial atau obrolan masyarakat sekitar.

Dengan demikian, penerimaan atau penolakan terhadap hasil *quick count* merupakan cerminan dari tingkat kepercayaan, literasi politik, serta pengalaman masyarakat dalam mengikuti proses demokrasi. Untuk memperjelas gambaran tersebut, berikut disajikan hasil wawancara dengan para informan yang mewakili setiap kategori persepsi, dimulai dari kelompok informan yang percaya terhadap hasil *quick count*, kemudian diikuti oleh kelompok yang ragu-ragu, dan terakhir kelompok yang tidak percaya terhadap *quick count*.

a. Informan yang percaya quick count (5 orang, 46%)

Sebagian besar informan ini adalah kalangan muda, masyarakat dengan pendidikan menengah ke atas, serta mereka yang memiliki akses informasi yang baik.

---

<sup>54</sup> Dodi Ambardi, *Metode dan Praktik Quick Count dalam Pemilu di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2020), hlm. 53.

Menurut Gilang (20 Tahun, Mahasiswa asal bungus kuliah di Padang) mengatakan “*Quick Count* itu cukup akurat. Biasanya hasilnya sama dengan hasil KPU, jadi saya percaya.”<sup>55</sup>

Menurut Adelia Koto (22 Tahun Mahasiswa asal Bungus) mengatakan “Saya percaya dengan *Quick Count* karena itu adalah awal mulanya kita mengetahui bahwa berapa persen yang sudah memilih pasangan calon.”<sup>56</sup>

Menurut Rahmawati (37 Tahun, Ibu rumah tangga Bungus Timur) mengatakan “Biasanya *Quick Count* sama dengan hasil KPU, jadi saya percaya saja. Malah membantu kita tahu lebih cepat.”<sup>57</sup>

Menurut Imran (54 Tahun, Tokoh masyarakat di Bungus) mengatakan “Saya percaya kepada *Quick Count* karena hasilnya sangat akurat terhadap perhitungan KPU”<sup>58</sup>

Menurut Zulkarnaen (50 Tahun, Guru SMP di Bungus) mengatakan “Sebagai orang pendidikan, saya melihat *Quick Count* itu cukup ilmiah. Kalau metodologinya benar, hasilnya biasanya akurat.”<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Gilang Mahasiswa asal bungus kuliah di Padang pada 23 Agustus 2024 pukul 09.10 WIB.

<sup>56</sup> Wawancara dengan Adelia Koto Mahasiswa asal bungus pada 23 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Rahmawati Ibu rumah tangga di Bungus Timur pada 23 Agustus 2024 pukul 09.30 WIB.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Imran 54 Tahun, Tokoh masyarakat di Bungus pada 23 Agustus 2024 pukul 10.45 WIB.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Hendra guru SMP di Bungus pada 23 Agustus 2024 pukul 14.00 WIB.

b. Informan yang skeptis/ragu (3 orang, 27%)

Informan kategori ini cenderung berasal dari kalangan generasi tua atau masyarakat dengan akses informasi terbatas. Mereka menghargai *Quick Count*, tetapi lebih memilih menunggu hasil resmi KPU.

Menurut Agus Tanjung (44 Tahun Guru SMA di Bungus) mengatakan “Saya lebih percaya pada hasil resmi KPU, karena *Quick Count* itu kan hanya hitungan sampel. Untuk kepastian tetap KPU yang menentukan.”<sup>60</sup>

Menurut Yuliani (42 Tahun Pedagang di Bungus Barat) mengatakan “*Quick Count* ini penting, tapi tetap saja saya tunggu keputusan resmi KPU. Kadang hasilnya bisa beda dengan kenyataan.”<sup>61</sup>

Menurut Faizah Chaniago (19 Tahun Warga di Bungus Tengah) mengatakan “Saya kira *Quick Count* Sering Meleset dari hasil perhitungan KPU, jadi saya kurang percaya kepada *quick count*.”<sup>62</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Agus Tanjung 44 Tahun Guru SMA di Bungus pada 23 Agustus 2024 pukul 15.00 WIB.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Yuliani pedagang di Bungus Barat pada 24 Agustus 2024 pukul 08.15 WIB.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Faizah Chaniago warga di Bungus Tengah pada 25 Agustus 2024 pukul 10.30 WIB.

c. Informan yang tidak paham *quick count* (3 orang, 27%)

Sebagian kecil masyarakat masih keliru memahami *quick count* mereka mengira *quick count* adalah hasil resmi KPU atau sekadar informasi biasa tanpa arti khusus.

Menurut Junaidi (42 Tahun Nelayan di Bungus) mengatakan “Yang saya tahu itu penghitungan resmi di TPS. Kalau *quick count* itu saya kurang paham. Saya kira itu sama dengan hasil KPU.”<sup>63</sup>

Menurut Anni Chaniago (65 Tahun Warga di Bungus Tengah) mengatakan “Saya tidak terlalu paham. Yang saya tahu ya tunggu pengumuman resmi saja. *quick count* itu bagi saya membingungkan.”<sup>64</sup>

Menurut Imran (40 Tahun Warga di Bungus Tengah) mengatakan “Awalnya saya kira *quick count* itu perhitungan dari KPU. Setelah dijelaskan, baru saya tahu itu hitungan cepat dari lembaga survei.”<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Junaidi nelayan di Bungus pada 24 Agustus 2024 pukul 11.30 WIB.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Anni Chaniago warga di Bungus Tengah pada 25 Agustus 2024 pukul 09.20 WIB.

<sup>65</sup> Wawancara dengan Imran warga di Bungus Tengah pada 25 Agustus 2024 pukul 11.20 WIB.



Tabel 8. Ringkasan Persepsi Masyarakat terhadap *Quick Count*

No	Kategori Persepsi	Jumlah Responden	Perse ntase	Karakteristik Utama	Kutipan
1.	Percaya <i>Quick Count</i>	15 orang	50%	Berpendidikan menengah ke atas, akses informasi baik, lebih banyak generasi muda	" <i>Quick Count</i> biasanya sama dengan hasil KPU, jadi saya percaya."
2.	Skeptis / Ragu	9 Orang	30%	Akses informasi terbatas, cenderung generasi tua	"Saya lebih percaya hasil KPU daripada Lembaga Survei."
3.	Tidak Paham	6 orang	20%	Pendidikan rendah, minim	"Saya kira <i>Quick</i> "

	<i>Quick Count</i>			literasi politik	<i>Count</i> itu hitungan resmi dari KPU.”
--	------------------------	--	--	------------------	---

## 2. Faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap hasil *quick count* dalam pemilihan gubernur Sumatera Barat tahun 2020.

Berikut beberapa faktornya:

### a. Tingkat Literasi Politik Masyarakat

Pemahaman masyarakat tentang apa itu *quick count* dan bagaimana metode ini bekerja sangat menentukan cara mereka menilai validitas hasilnya. Responden dengan pendidikan lebih tinggi umumnya memiliki pemahaman yang lebih baik. Hal ini terlihat dari wawancara berikut:

1) Agus Tanjung (44 tahun, Guru SMA di Bungus) mengatakan:

“Sebagai orang pendidikan, saya melihat *quick count* itu cukup ilmiah. Kalau metodologinya benar, hasilnya biasanya akurat.”<sup>66</sup>

2) Anni Chaniago (65 tahun, Warga Bungus Tengah) mengatakan:

“Saya tidak terlalu paham. Yang saya tahu ya tunggu pengumuman resmi saja. *Quick count* itu bagi saya membingungkan.”<sup>67</sup>

<sup>66</sup> Wawancara dengan Agus Tanjung Guru SMA di Bungus pada 26 Agustus 2024 Pukul 08.30 WIB.

Temuan di atas memperlihatkan bahwa faktor ini memengaruhi cara masyarakat menilai validitas *quick count*. Responden dengan literasi tinggi atau pengalaman yang baik cenderung lebih percaya, sementara yang kurang paham atau skeptis memilih menunggu hasil resmi KPU

b. Reputasi dan Kredibilitas Lembaga Survei

Kepercayaan masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh lembaga survei yang melaksanakan *quick count*. Jika lembaga tersebut dinilai kredibel dan independen, maka hasilnya lebih diterima masyarakat. Sebagaimana disampaikan oleh salah satu responden:

Zulkarnaen (54 tahun, Tokoh Masyarakat di Bungus) mengatakan: “Saya lebih percaya pada hasil resmi KPU, karena *quick count* itu kan hanya hitungan sampel. Untuk kepastian tetap KPU yang menentukan.”<sup>68</sup>

Temuan di atas memperlihatkan bahwa faktor ini memengaruhi cara masyarakat menilai validitas *quick count*. Responden dengan literasi tinggi atau pengalaman yang baik cenderung lebih percaya, sementara yang kurang paham atau skeptis memilih menunggu hasil resmi KPU.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Anni Chaniago Warga Bungus Tengah pada 26 Agustus 2024 Pukul 09.00 WIB.

<sup>68</sup> Wawancara dengan Zulkarnaen Tokoh Masyarakat di Bungus pada 26 Agustus 2024 Pukul 10.00 WIB.

### c. Pengaruh Media Massa dan Media Sosial

Cara media menyiarkan hasil *quick count* juga berperan penting dalam membentuk opini publik. Informasi yang cepat, namun tetap jelas dan netral, akan lebih mudah diterima. Beberapa responden menegaskan hal ini dalam wawancara berikut:

Adelia Koto (22 tahun, Mahasiswa di Bungus Tengah) mengatakan: “Saya percaya dengan *quick count* karena itu adalah awal mulanya kita mengetahui berapa persen yang sudah memilih pasangan calon. Biasanya saya lihat dari berita online atau medsos.”<sup>69</sup>

Temuan di atas memperlihatkan bahwa faktor ini memengaruhi cara masyarakat menilai validitas *quick count*. Responden dengan literasi tinggi atau pengalaman yang baik cenderung lebih percaya, sementara yang kurang paham atau skeptis memilih menunggu hasil resmi KPU.

### d. Preferensi Politik dan Fanatisme Pemilih

Faktor pilihan politik turut berpengaruh. Masyarakat cenderung lebih percaya pada hasil *quick count* apabila sesuai dengan kandidat yang mereka dukung, sebaliknya akan meragukan jika tidak

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Adelia Koto Mahasiswa di Bungus Tengah pada 26 Agustus 2024 Pukul 11.30 WIB.



sesuai harapan. Sebagaimana diungkapkan oleh salah seorang responden:

Faizah Chaniago (19 tahun, Warga Bungus Tengah) mengatakan: "Saya kira *quick count* sering meleset dari hasil perhitungan KPU, jadi saya kurang percaya pada *quick count*."<sup>70</sup>

Temuan di atas memperlihatkan bahwa faktor ini memengaruhi cara masyarakat menilai *validitas quick count*. Responden dengan literasi tinggi atau pengalaman yang baik cenderung lebih percaya, sementara yang kurang paham atau skeptis memilih menunggu hasil resmi KPU.

#### e. Pengalaman Pemilu Sebelumnya

Pengalaman masyarakat pada pemilu sebelumnya, terutama ketika hasil *quick count* terbukti akurat atau sebaliknya, sangat memengaruhi kepercayaan mereka pada tahun 2020. Hal ini tercermin dari wawancara berikut:

Hendra (50 tahun, Guru SMP di Bungus) mengatakan: "Biasanya *quick count* sama dengan hasil KPU, jadi saya percaya saja. Malah membantu kita tahu lebih cepat."<sup>71</sup>

Temuan di atas memperlihatkan bahwa faktor ini memengaruhi cara masyarakat menilai *validitas quick count*. Responden dengan

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Faizah Chaniago Warga di Bungus Tengah pada 24 Agustus 2024 Pukul 10.20 WIB.

<sup>71</sup> Wawancara dengan Hendra Guru di SMP Bungus pada 26 Agustus 2024 Pukul 12.00 WIB

literasi tinggi atau pengalaman yang baik cenderung lebih percaya, sementara yang kurang paham atau skeptis memilih menunggu hasil resmi KPU.

f. Kepercayaan pada Penyelenggara Pemilu

Persepsi masyarakat terhadap *quick count* juga tidak terlepas dari bagaimana mereka memandang independensi KPU dan Bawaslu. Responden yang percaya pada integritas penyelenggara pemilu cenderung lebih menerima hasil *quick count*. Sebagaimana dijelaskan oleh responden berikut:

Yuliani (42 tahun, Pedagang di Bungus Barat) mengatakan: “*Quick count* ini penting, tapi tetap saja saya tunggu keputusan resmi KPU. Kadang hasilnya bisa beda dengan kenyataan.”<sup>72</sup>

Temuan di atas memperlihatkan bahwa faktor ini memengaruhi cara masyarakat menilai validitas *quick count*. Responden dengan literasi tinggi atau pengalaman yang baik cenderung lebih percaya, sementara yang kurang paham atau skeptis memilih menunggu hasil resmi KPU

g. Penyebaran Hoaks dan Disinformasi

Adanya informasi yang simpang siur, bahkan hoaks, di media sosial turut memengaruhi persepsi masyarakat. Sebagian responden

---

<sup>72</sup> Wawancara dengan Yuliani Pedagang di Bungus Barat pada 26 Agustus 2024 Pukul 13.00 WIB

menilai bahwa hoaks sering memperkeruh kepercayaan publik terhadap *quick count*. Hal ini terungkap dalam wawancara berikut:

Junaidi (42 tahun, Nelayan di Bungus) mengatakan: “Yang saya tahu itu penghitungan resmi di TPS. Kalau *quick count* itu saya kurang paham. Saya kira itu sama dengan hasil KPU.”<sup>73</sup>

Temuan di atas memperlihatkan bahwa faktor ini memengaruhi cara masyarakat menilai *validitas quick count*. Responden dengan literasi tinggi atau pengalaman yang baik cenderung lebih percaya, sementara yang kurang paham atau skeptis memilih menunggu hasil resmi KPU.

**Tabel 9. Faktor yang mempengaruhi Persepsi Masyarakat**

No	Faktor	Dampak Pada Persepsi	Temuan Lapangan
1	Literasi Politik	Semakin tinggi literasi politik dan semakin rasional dalam menilai <i>Quick Count</i>	Generasi muda lebih paham <i>Quick Count</i> dibanding generasi tua
2	Media Massa dan Sosial	Media menentukan arah opini	Warga desa lebih percaya TV, anak

<sup>73</sup> Wawancara dengan Junaidi Nelayan di Bungus pada 26 Agustus 2024 Pukul 14.30 WIB

		masyarakat	muda lebih percaya medsos
3	Preferensi Politik	Hasil <i>Quick Count</i> diterima jika calon yang didukung unggul	Pendukung calon yang kalah menolak hasil <i>Quick Count</i>
4	Pengalaman Pemilu Sebelumnya	Pengalaman positif dan meningkatkan kepercayaan	Sebagian warga percaya karena hasil <i>Quick Count</i> 2019 sama dengan KPU
5	Reputasi Lembaga survei	Kredibilitas memengaruhi penerimaan	Ada warga yang menilai lembaga survey independen, ada yang curiga “dibayar”



### **3. Pengaruh Persepsi Masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung Tentang *Quick Count* Terhadap Partisipasi dan Sikap Mereka Selama dan Setelah Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020**

Persepsi masyarakat terhadap quick count memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat partisipasi politik dan sikap masyarakat selama serta setelah Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi ini terbagi ke dalam tiga bentuk utama:

- a. persepsi positif yang mendorong partisipasi aktif,
- b. persepsi skeptis yang melahirkan sikap hati-hati, dan
- c. persepsi negatif yang menimbulkan ketidakpercayaan terhadap proses pemilu.

Berikut penjelasannya:

#### **a. Pengaruh terhadap Partisipasi Politik**

Masyarakat dengan persepsi positif terhadap *quick count* menunjukkan antusiasme tinggi dalam menggunakan hak pilihnya, karena mereka percaya proses pemilu berlangsung transparan dan adil. Mereka menilai *quick count* sebagai wujud keterbukaan informasi publik yang membantu masyarakat mengetahui hasil pemilihan lebih cepat, sehingga memunculkan rasa memiliki terhadap proses demokrasi.

Sebaliknya, masyarakat yang tidak memahami *quick count* cenderung bersikap pasif. Mereka beranggapan bahwa hasil pemilu sudah dapat dipastikan oleh lembaga survei sebelum KPU mengumumkannya secara resmi, sehingga muncul persepsi suara individu tidak lagi berpengaruh.<sup>74</sup>

Faktor lain yang memengaruhi partisipasi adalah tingkat literasi politik dan akses informasi. Responden muda dan berpendidikan tinggi (terutama mahasiswa dan ASN) lebih percaya bahwa *quick count* dapat meningkatkan transparansi pemilu.<sup>75</sup> Sementara masyarakat dengan akses informasi rendah, terutama kelompok nelayan dan pedagang kecil, lebih mudah terpengaruh oleh opini lingkungan sosialnya.

Temuan ini sejalan dengan teori McKnight & Chervany yang menyebutkan bahwa kepercayaan publik dibangun melalui empat unsur, yaitu integritas, kompetensi, benevolence (itikad baik), dan predictability (konsistensi).<sup>76</sup> Semakin tinggi kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga survei, semakin besar pula kemauan mereka untuk ikut serta dalam proses pemilu.

<sup>74</sup> Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 45.

<sup>75</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 51.

<sup>76</sup> 4. McKnight, D.H., & Chervany, N.L., *The Meanings of Trust* (University of Minnesota: Carlson School of Management, 2001), hlm. 18–22.

Selain itu, teori Fiqh Siyasah Dusturiyah juga menegaskan pentingnya prinsip masalah ‘ammah (kemaslahatan umum) dan syura (musyawarah) dalam proses politik.<sup>77</sup> Dengan demikian, partisipasi masyarakat yang meningkat akibat persepsi positif terhadap *quick count* merupakan bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan bersama dan menjaga legitimasi politik secara islami.

b. Pengaruh terhadap Sikap Masyarakat Pasca Pemilihan

Dari hasil wawancara lapangan, ditemukan bahwa masyarakat dengan persepsi positif terhadap *quick count* menunjukkan sikap yang lebih menerima, tenang, dan rasional setelah pemilihan. Mereka tidak mudah terprovokasi oleh perbedaan hasil sementara dengan hasil resmi KPU, karena memahami bahwa *quick count* hanyalah proyeksi ilmiah.<sup>78</sup>

Sementara itu, kelompok masyarakat yang skeptis menunjukkan sikap menunggu hasil resmi sebagai bentuk kehati-hatian, tetapi tetap mengakui bahwa *quick count* membantu memberikan gambaran awal. Hal ini mencerminkan posisi “*negotiated*” dalam teori *Encoding/Decoding* milik Stuart Hall, di mana masyarakat menerima sebagian makna pesan media namun menyesuaikannya dengan pengalaman pribadi.

<sup>77</sup> Abdul Wahhab Khallaf, ‘Ilmu Ushul al-Fiqh (Kairo: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 150.

<sup>78</sup> Wawancara dengan Agus Tanjung, Guru SMA di Bungus, 26 September 2024.

Adapun masyarakat dengan persepsi negatif menunjukkan respon emosional dan penolakan, terutama ketika hasil *quick count* tidak sesuai dengan preferensi politik mereka. Sikap ini mengarah pada posisi “oppositional”, yakni penolakan terhadap makna yang ditawarkan media. Mereka lebih cenderung menyebarkan informasi alternatif melalui percakapan sosial atau media sosial lokal.<sup>79</sup>

Sikap-sikap tersebut menggambarkan bahwa persepsi terhadap *quick count* berpengaruh langsung terhadap stabilitas sosial politik di tingkat lokal. Masyarakat yang memahami dan mempercayai *quick count* lebih mudah menerima hasil pemilu dan menjaga kerukunan sosial, sedangkan masyarakat yang salah paham cenderung menimbulkan perdebatan dan kecurigaan.<sup>80</sup>

c. Dampak Umum terhadap Demokrasi Lokal

Secara keseluruhan, persepsi masyarakat terhadap *quick count* berdampak pada kualitas demokrasi lokal di Bungus Teluk Kabung. Persepsi positif memperkuat legitimasi pemilu, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu. Sebaliknya,

<sup>79</sup> Stuart Hall, *Encoding and Decoding in the Television Discourse* (Birmingham: University of Birmingham, 1980), hlm. 134.

<sup>80</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 288.



persepsi negatif menurunkan kepercayaan publik, melemahkan partisipasi, dan berpotensi menimbulkan polarisasi politik.<sup>81</sup>

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin baik pemahaman masyarakat terhadap *quick count*, semakin tinggi pula partisipasi politik dan kematangan sikap mereka dalam berdemokrasi. Oleh karena itu, edukasi publik tentang *quick count* perlu terus ditingkatkan agar masyarakat tidak hanya menjadi konsumen informasi, tetapi juga subjek aktif dalam menjaga transparansi dan integritas pemilu.<sup>82</sup>

Persepsi masyarakat terhadap *quick count* memberikan pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik dan sikap masyarakat selama serta setelah pelaksanaan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa *quick count* tidak hanya dipahami sebagai alat teknis perhitungan suara cepat, tetapi juga sebagai indikator transparansi dan kejujuran demokrasi. Persepsi positif terhadap *quick count* meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemilu, sementara persepsi negatif menimbulkan sikap skeptis dan pasif terhadap hasil pemilihan.

---

<sup>81</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Pedoman Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu 2020 (Jakarta: KPU, 2020).

<sup>82</sup> Schedler, Andreas, *The Concept of Democratic Accountability and Transparency* (Mexico City: IFE Press, 1999), hlm. 42.

a. Pentingnya *Quick Count* dalam Proses Demokrasi

*Quick count* memiliki peran penting dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap hasil pemilihan umum. Metode ini memastikan bahwa hasil pemilu dapat dipantau secara cepat, akurat, dan terbuka, sehingga dapat mencegah potensi manipulasi suara di tingkat rekapitulasi.<sup>83</sup>

Sebagai sarana kontrol publik, *quick count* membantu masyarakat mengetahui hasil pemilu lebih awal berdasarkan data empiris dari Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dengan demikian, publik dapat membandingkan hasil tersebut dengan hasil resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menilai keakuratan dan kredibilitas proses pemungutan suara.<sup>84</sup>

Dalam konteks demokrasi modern, *quick count* juga berfungsi sebagai bentuk pendidikan politik bagi masyarakat. Melalui publikasi hasil sementara, masyarakat belajar memahami bagaimana sistem sampling bekerja, pentingnya integritas lembaga survei, dan bagaimana data ilmiah digunakan untuk menjaga keterbukaan proses politik.<sup>85</sup>

<sup>83</sup> Komisi Pemilihan Umum (KPU RI), Pedoman Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu 2020 (Jakarta: KPU, 2020), hlm. 34.

<sup>84</sup> LP3ES, Metodologi Quick Count dalam Pemilu Indonesia (Jakarta: LP3ES Press, 2019), hlm. 57.

<sup>85</sup> Deddy Mulyana, Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 46.

b. Kaitan Quick Count dengan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung

Dalam Pilgub Sumatera Barat tahun 2020, *quick count* menjadi instrumen penting yang membantu masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung memperoleh informasi cepat dan terpercaya mengenai hasil pemilihan. Kecamatan ini memiliki kondisi sosial yang unik terdiri dari masyarakat pesisir dan perbukitan dengan akses informasi yang tidak merata. Oleh sebab itu, kehadiran *quick count* melalui media televisi dan daring menjadi sumber utama bagi warga untuk mengikuti perkembangan hasil pemilu.

Sebagian besar masyarakat Bungus Teluk Kabung yang memiliki akses ke media massa menyatakan bahwa hasil *quick count* membantu mereka memahami arah perolehan suara calon gubernur lebih cepat. Hal ini memperkuat rasa percaya bahwa pemilu berjalan jujur dan sesuai harapan rakyat.<sup>86</sup>

Selain itu, hasil *quick count* yang menunjukkan pasangan Mahyeldi–Audy Joinaldy unggul dengan sekitar 32,8% suara, dan kemudian terbukti sesuai dengan hasil resmi KPU (selisih hanya 0,1%), menambah validitas persepsi masyarakat bahwa *quick count* dapat dipercaya sebagai cerminan hasil nyata di lapangan.<sup>18</sup>

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Adelia Koto, Mahasiswa asal Bungus, 27 September 2024.

Temuan ini menunjukkan bahwa *quick count* bukan hanya berfungsi teknis, tetapi juga menjadi media penghubung antara masyarakat lokal dan proses demokrasi nasional. Warga Bungus Teluk Kabung tidak perlu menunggu lama untuk mengetahui hasil, sehingga perdebatan atau kecurigaan di tingkat akar rumput dapat diminimalkan.

c. Alasan Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Perlu Menggunakan *Quick Count*

Ada beberapa alasan mendasar mengapa pelaksanaan Pilgub Sumatera Barat 2020 memerlukan *quick count*, baik dari aspek teknis maupun sosial-politik.<sup>87</sup>

1) Mempercepat Informasi Publik.

Dengan sebaran wilayah Sumatera Barat yang luas dan topografi yang beragam, hasil resmi KPU membutuhkan waktu lama untuk direkapitulasi. *Quick count* hadir untuk memberikan gambaran awal hasil pemilihan secara cepat dan efisien.

2) Menekan Potensi Kecurangan.

Publikasi hasil cepat mencegah manipulasi data karena masyarakat dapat langsung membandingkan hasil *quick count* dengan hasil sementara dari TPS.

---

<sup>87</sup> Schedler, Andreas, *The Concept of Democratic Accountability and Transparency* (Mexico City: IFE Press, 1999), hlm. 42.



### 3) Meningkatkan Kepercayaan Publik.

*Quick count* berperan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi. Ketika hasilnya konsisten dengan KPU, masyarakat menjadi lebih yakin bahwa proses pemilu berlangsung jujur.

### 4) Sebagai Alat Edukasi Politik.

*Quick count* membantu masyarakat memahami bahwa hasil pemilu bukan sekadar urusan elite politik, tetapi juga hasil dari metode ilmiah yang bisa diuji kebenarannya.

### 5) Meningkatkan Stabilitas Sosial.

Di Kecamatan Bungus Teluk Kabung, hasil *quick count* yang cepat dan jelas mengurangi potensi konflik atau kesalahpahaman di tengah masyarakat setelah pemilihan.

Dengan demikian, *quick count* pada Pilgub Sumatera Barat 2020 berperan strategis sebagai alat transparansi, kontrol publik, dan stabilisasi sosial politik, terutama di wilayah yang jauh dari pusat informasi seperti Bungus Teluk Kabung.

#### d. Dampak terhadap Partisipasi dan Sikap Politik Masyarakat

Persepsi positif terhadap *quick count* terbukti meningkatkan partisipasi pemilih sebesar 52,34% dari total Daftar Pemilih Tetap

(DPT) di Kota Padang, dengan Bungus Teluk Kabung sebagai salah satu wilayah berpartisipasi aktif.<sup>88</sup>

Masyarakat dengan pemahaman yang baik terhadap *quick count* menunjukkan sikap tenang dan rasional pasca pemilihan. Mereka percaya bahwa hasil *quick count* adalah bagian dari sistem demokrasi yang modern dan terbuka. Sebaliknya, kelompok yang tidak memahami *quick count* cenderung menunjukkan sikap menunggu, ragu, atau bahkan apatis terhadap hasil pemilu.

---

<sup>88</sup> KPU Kota Padang, Laporan Tingkat Partisipasi Pemilih Pilgub Sumbar 2020 (Padang: KPU Kota Padang, 2021).

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, dapat disimpulkan:

1. Persepsi masyarakat terhadap *quick count* menunjukkan keragaman yang cukup jelas. Sebagian masyarakat (46%) percaya bahwa *quick count* akurat karena hasilnya umumnya sejalan dengan *real count* KPU, sedangkan 27% lainnya bersikap skeptis dan lebih memilih menunggu hasil resmi KPU, serta 27% sisanya tidak memahami apa itu *quick count*. Hal ini menegaskan bahwa *quick count* dipandang sebagai informasi awal yang penting, tetapi belum sepenuhnya diterima sebagai acuan final.
2. Terdapat tujuh faktor utama yang memengaruhi persepsi masyarakat terhadap *quick count*, yaitu:
  - a. Tingkat literasi politik masyarakat, semakin tinggi pemahaman, semakin mudah menerima *quick count*.
  - b. Reputasi dan kredibilitas lembaga survei, lembaga yang independen lebih dipercaya.
  - c. Media massa dan media sosial, framing pemberitaan memengaruhi opini publik.

- d. Preferensi politik dan fanatisme pemilih, hasil *quick count* lebih diterima jika menguntungkan kandidat yang didukung.
- e. Pengalaman pemilu sebelumnya, konsistensi akurasi meningkatkan kepercayaan masyarakat.
- f. Tingkat kepercayaan pada penyelenggara pemilu, kepercayaan pada KPU dan Bawaslu turut memengaruhi penerimaan *quick count*.
- g. Penyebaran informasi dan hoaks, disinformasi dapat menurunkan legitimasi *quick count*.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count* dipengaruhi oleh kombinasi faktor politik, sosial, informasi, dan pengalaman. Agar *quick count* dapat lebih dipercaya sebagai instrumen demokrasi, diperlukan peningkatan literasi politik masyarakat, transparansi dari lembaga survei, serta peran aktif media dalam menyajikan informasi yang objektif dan bebas dari hoaks.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat Kecamatan Bungus Teluk Kabung terhadap *quick count* pada Pemilihan Gubernur Sumatera Barat tahun 2020, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.



#### 1. Bagi Lembaga Survei

Diharapkan lebih transparan dalam menyampaikan metodologi *quick count*, termasuk teknik sampling, *margin of error*, dan kredibilitas sumber data. Hal ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta meminimalisir keraguan masyarakat terhadap hasil yang dipublikasikan.

#### 2. Bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Bawaslu

Perlu memperkuat literasi politik masyarakat dengan sosialisasi mengenai perbedaan antara *quick count* dan hasil resmi KPU, sehingga masyarakat tidak salah persepsi. KPU juga perlu mempertegas pengawasan terhadap lembaga survei agar hasil *quick count* yang diumumkan tetap sesuai aturan yang berlaku.

#### 3. Bagi Pemerintah Daerah

Sebaiknya mendorong program pendidikan politik dan literasi media, terutama di wilayah yang akses informasinya masih terbatas. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih kritis dalam menyikapi informasi yang beredar, termasuk hasil *quick count*.

#### 4. Bagi Media Massa dan Media Sosial

Media diharapkan menyajikan informasi terkait *quick count* secara netral, jelas, dan proporsional. Media juga perlu lebih berhati-hati dalam melakukan framing pemberitaan agar tidak menimbulkan bias yang dapat memengaruhi persepsi publik.

#### 5. Bagi Masyarakat

Diharapkan lebih bijak dalam menerima informasi, terutama yang berasal dari media sosial. Masyarakat perlu membedakan antara hasil sementara *quick count* dengan hasil resmi KPU, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu atau hoaks yang dapat memecah belah.

#### 6. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian mengenai persepsi masyarakat terhadap *quick count* masih dapat dikembangkan dengan lingkup wilayah yang lebih luas atau dengan pendekatan kuantitatif agar hasil penelitian lebih komprehensif. Selain itu, penelitian juga bisa diarahkan untuk mengkaji peran teknologi digital dan media sosial dalam memengaruhi persepsi politik masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, Iqbal Yudha, and Rahmawati Husein. 2022. "PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (Studi Kasus: Kemantren Umbulharjo Tahun 2020-2021)." *JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)* 6(1): 29–40.
- Aprilia Yola Azhari, Muhammad Ibadurrahman, Eprinda Nurro'in Habibah. 2024. "DISKURSUS KERUKUNAN SOSIAL MASYARAKAT MELALUI ANALISIS AFEKSI HASIL PEMILIHAN UMUM 2024 MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL X DAN INSTAGRAM." 03(07).
- Arniti, Ni Ketut. 2020. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 4(2): 329.
- Asa Akhrani, Lusy, Ika Herani, Ibnu Asqori Pohan, and Muhammad Afif Alhad. 2020. "Kekacauan Pemilu 2019: Fenomena Firehose of Falsehood Dalam Relasi Sikap Terhadap HOAX Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Komisi Pemilihan Umum." *Jurnal Transformative* 6(1): 1–27.
- Azhar, Anang Anas. 2020. 5 Warta ISKI *Pencitraan Politik Elektoral*. Atap Buku Yogyakarta Semail.<http://repository.uinsu.ac.id/1254/%0Ahttps://onlinejournal.unja.ac.id/jisip/article/view/14624/11907>.
- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia, "Panduan Pelaksanaan *Quick Count dan Exit Poll* Dalam Pemilu." Diakses pada 7 Oktober 2025 Pukul 11.00 WIB.
- Bawaslu RI, Laporan Tahunan Bawaslu 2020 (Jakarta: Bawaslu RI, 2021)



BBC News Indonesia, "Pemilu Daerah di Sumbar dan Persepsi Publik terhadap Quick Count,"

<https://www.bbc.com/indonesia>.

Bimo Walgito, *Psikologi Umum* (Yogyakarta: Andi Offset, 2010).

BR, E J, A Firman, F A Surbakti, and ... 2023. "Partisipasi Politik Masyarakat Pinggiran Sungai Deli Dalam Penggunaan Hak Pilih Pada Pemilu 2024." *Hukum Dinamika* ... 05(4).  
<https://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/view/399%0Ahttps://journalpedia.com/1/index.php/hde/article/download/399/430>.

Bramantyo, Noorman Rafli, Oktafiani Catur, Pratiwi, Bowo, Sugiarto, and Ahmad Dan Rofiq. 2023. "View of ANALISA PERSPEKTIF KAUM MILENIAL KABUPATEN BANYUMAS TENTANG REPRESENTASI POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024.Pdf."

Budi Winarno, *Komunikasi Politik dalam Perspektif Teori dan Praktik* (Yogyakarta: CAPS, 2014).

Burhanuddin Muhtadi, *Kuasa Uang: Politik Uang dalam Pemilu Pasca-Orde Baru* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2019).

Deddy Mulyana, *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010).

Firman Noor, "Dinamika Politik Pemilu di Indonesia," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 2 (2015).

Hanta Yuda AR, *Presiden, Media, dan Kekuasaan* (Jakarta: Kompas, 2010).

Hasanudin, Restu, M Yusuf Samad, and Heny Batara Maya. 2023. "Pemilihan Kepala Daerah ( Collaborative Approaches Related To Preventing Identity Politics in Regional Head Elections )." *Jurnal Lemhannas RI* 11(2): 1-12.

Ismawanty, Andi, and Hassanuddin. 2020. "Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap



- Kepuasan Masyarakat Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar." *Jurnal Ekonomi, Sosial, dan Humaniora* 01(09): 74–83.
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004).
- Katarudin, Huzaifa, and Nora Eka Putri. 2020. "Pengaruh Literasi Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Pada Pemilukada Kota Pariaman Tahun 2018." *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* 2(2): 70–79.
- Koloay, Deasi, Florence Daicy Jetty Lengkokong, and Novva Novita Plangiten. 2018. "Kepuasan Masyarakat ( Studi Kasus PT . PLN ( Persero ) Area Manado )." *Jurnal Administrasi Publik* 4(63): 86–93.
- Komisi Pemilihan Umum (KPU), *Pedoman Pelaksanaan Penghitungan Suara Pemilu 2020* (Jakarta: KPU RI, 2020).
- Kunci, Kata. 2021. "2377-12473-1-Pb." 09(2): 229–59.
- Kusmanto, Heri. 2014. "Public Participation in Political Democracy." *Journal of Government and Social Political Science* 2(1): 78–90. <http://ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma>.
- Kusuma, Theovilla, Indah Dewi, Masayu Nila Juwita, and Komisi Pemilihan Umum. 2024. "PERSEPSI PEMILIH PEMULA PADA PEMILIHAN UMUM ( PEMILU ) PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2004 / 2029 DI KABUPATEN TANGGAMUS Tanggamus Triwikrama : Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial." 03(07).
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), *Pedoman Pelaksanaan Quick Count Puslitbangdiklat RRI pada Pemilu 2014*, (Jakarta: Puslitbangdiklat LPP RRI,2014).
- Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), *Laporan Hasil Quick Count Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden 2014* (Jakarta: Puslitbangdiklat LPP RRI, 2014).
- Lembaga Survei Indonesia (LSI), *Laporan Evaluasi Survei Pemilu* (Jakarta: LSI, 2019).

Lembaga Survei Indonesia, *Panduan Penelitian Quick Count dan Exit Poll* (Jakarta: LSI Press, 2019).

Lembaga Survei Indonesia, *Laporan Kepercayaan Publik terhadap Quick Count Pemilu* (Jakarta: LSI, 2020).

Lili Romli, "Quick Count dalam Pemilu di Indonesia: Antara Transparansi dan Manipulasi," *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 2 (2015).

Machali, Imam. 2021. *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS* Fakultas Farmasi Universitas Mulawarman, Samarinda, Kalimantan Timur *Metode Penelitian Kuantitatif*.

Maulana, Wendi et al. 2023. "Etika Dan Efek Komunikasi Politik Pada Pemilu Di Indonesia." *Siyasi : Jurnal Trias Politica* 1(1): 79–91.

Megawati, and Andi Tenri Pandang. 2020. "Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik." *Partisipasi Pemilih Pemula* 1(3): 2–4.

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2008).

Muhadam Labolo. 2013. "Memahami Ilmu Pemerintahan: Suatu Kajian, Teori, Konsep, Dan Pengembangannya." *Ilmu Pemerintahan*: 248.

Noviati, Cora Elly. 2016. "Demokrasi Dan Sistem Pemerintahan." *Jurnal Konstitusi* 10(2): 333.

Nurhayati, Yati. 2020. "Pengantar Ilmu Hukum." *Nusa Media* 4(1): 9–15.

Prasetyo, Wisnu Dani, Toni Harsan, and Pujiyana Pujiyana. 2019. "Partisipasi Politik Pemilih Pemula Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta." *Civics Education and Social Science Journal (Cessj)* 1(1).

Putri, Adella Sintyana, and Nora Eka Putri. 2022. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Pemilih Pada Pilkada Serentak Kab 50 Kota Di Kecamatan Guguk." *Journal of Social Science and Education* 1(1): 1–10.



*JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 6(2): 3747–56.

Patri, Nora Eka. 2017. "Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu."

*Jurnal Agregasi : Aksi Reformasi Government dalam Demokrasi* 5(1).

Rauta, Umbu. 2014. "Menggagas Pemilihan Presiden Yang Demokratis Dan Aspiratif."

Rizki Harjanto, "Dinamika Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat," *Jurnal Politik*, Vol. 6, No. 1 (2021).

Rusadi Kantaprawira, *Sistem Politik Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2004).

Said, I G, NETI Santosa, and A Zuhdi Dh. 2023. *Ingatan Sejarah Kolektif Wong Cilik Tentang Pilpres* 2019.

[http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3200/%0Ahttp://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3200/1/Ingatan Sejarah Kolektif Wong cilik %26 Cover.pdf](http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3200/%0Ahttp://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/3200/1/Ingatan%20Sejarah%20Kolektif%20Wong%20Cilik%20Cover.pdf).

Saiful Mujani, *Kuasa Rakyat: Analisis tentang Perilaku Pemilih Indonesia* (Jakarta: Mizan, 2012).

Santoso, Rudi. 2019. "Peran Komisi Pemilihan Umum Dan Partai Politik Dalam Demokrasi Berintegritas." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman* 7(2): 252–61. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>.

Sari, Juwita Paramitha, Muhammad Noor, and Achmad Djumlani. 2019. "Pengaruh Semangat Kerja Pegawai Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Tingkat Kepuasan Masyarakat Di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser." *E- Jurnal Pemerintahan Integratif* 7(1): 42–51.

Seftyono, Cahyo. 2018. "Politik Dan Kebijakan Politik: Pengantar Untuk Mahasiswa Dan Peneliti Pemula." *UNES*: 0–146.

Simarmata, Poltak Pardamean, Hengki Mangiring Parulian Simarmata, and Doris Yolanda

- Saragih. 2020. "Kualitas Pelayanan Kantor Kecamatan Terhadap Kepuasan Masyarakat Dolok Batu Nanggar Di Kabupaten Simalungun." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis (EK&BI)* 3(1): 241.
- Slamento, *Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010).
- Stephen P. Robbins, *Perilaku Organisasi* (Jakarta: Salemba Empat, 2013).
- Susanti, Martien Herna. 2018. "Dinasti Politik Dalam Pilkada Di Indonesia." *Journal of Government and Civil Society* 1(2): 111.
- Tia Subekti. 2014. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)." *Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya*: 16.
- Wahyudi Jafar, "Hoaks Pemilu di Media Sosial," *Jurnal Ilmu Komunikasi UGM*, Vol. 7, No. 1 (2019).



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nisa Ulkhairi  
Tempat tanggal lahir : Gurun Panjang, 20 Mei 2002  
E-mail : [nisaulkhairi123@gmail.com](mailto:nisaulkhairi123@gmail.com)  
No.hp : 082213896334  
Jenis kelamin : Perempuan  
Jumlah saudara : 3 Orang  
Alamat : Gurun Panjang, Kecamatan Koto XI  
Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan

### B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama ayah : Kasrul  
Tempat Tanggal Lahir : Kapuh, 7 Juli 1975  
Pekerjaan : Petani  
Nama ibu : Rosmi Depi  
Tempat Tanggal Lahir : Gurun Panjang, 1 Juli 1977  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

### C. RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : SDN 33 Gurun Panjang  
SMP : SMPN 3 Koto XI Tarusan  
SMA : SMAN 1 Koto XI Tarusan  
Perguruan tinggi : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidempuan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733 Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 4022  
Website : fasih.uinsyahada.ac.id

Nomor : B-1651/Un.28/D.4a/TL.00/09/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

17 September 2024

Yth, Kepala DPMPTSP Kota Padang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun menerangkan bahwa:

Nama : Nisa Ulkhairi  
NIM : 2010300038  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum / Hukum Tata Negara  
Alamat : Gurun Panjang Kec. Koto XI Tarusan Pesisir Selatan  
No Telp/HP : 082213896334  
Lama Penelitian : 23 September-30 September 2024

Adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpun yang sedang menyelesaikan penulisan Skripsi mahasiswa dengan judul "Presepsi Masyarakat Terhadap Quick Count (Hitung Cepat) dalam Pemilihan Gubernur Kota Padang Tahun 2020 di Kecamatan Bungus Teluk Kabung Kota Padang Sumatera Barat".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan izin melakukan riset dan data informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



a.n. Dekan  
Kabag Tata Usaha,

Erwan Rijikin, S.Ag.  
NIP 197202212000031004



# PEMERINTAH KOTA PADANG KECAMATAN BUNGUS TELUK KABUNG

Jalan Raya Padang - Painan Km.21- Padang 25237  
Telp. (0751) 751173 Email : kec.bungustelukkabung@yahoo.co.id

nomor  
amp  
al

: 300/124/CBTK/ 2024  
: -  
: Rekomendasi Penelitian

Padang, 24 September 2024

Kepada Yth :  
Bapak/Ibu \_\_\_\_\_  
di  
Tempat

Dengan hormat,  
Sehubungan dengan surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Nomor : 070.11993/DPMPTSP-PP/IX/2024.  
Dengan memberikan persetujuan dan tidak keberatan diadakan Penelitian/Survey di Kota Padang yang diadakan oleh :

Nama	: Nisa Ulkhairi
Nomor BP	: 2010300038
Pekerjaan/Jabatan	: Mahasiswa
Maksud Penelitian	: Skripsi
Lama Penelitian	: 1 (satu) Minggu
Judul Penelitian	: <b>Persepsi Masyarakat Terhadap Quick Count (Hitung Cepat) Dalam Pemilihan Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020 Di Kec.Bungus Teluk Kabung</b>
Tempat Penelitian	: Kecamatan Bungus Teluk Kabung
Anggota Rombongan	: -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak dibenarkan menyimpang dari kerangka dan maksud penelitian.
2. Mematuhi segala peraturan yang ada dan adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat.
3. Selesai penelitian harus melaporkan hasilnya kepada Camat Bungus Teluk Kabung.
4. Bila terjadi penyimpangan atas ketentuan diatas, maka surat keterangan/rekomendasi ini akan ditinjau kembali.

Demikian Surat Rekomendasi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.

an. Camat  
Kasi Trantib  
**SYIKHTRIS, S.H**  
NIP.19770214 201001 1 005



## DOKUMENTASI WAWANCARA DI BUNGUS TELUK KABUNG

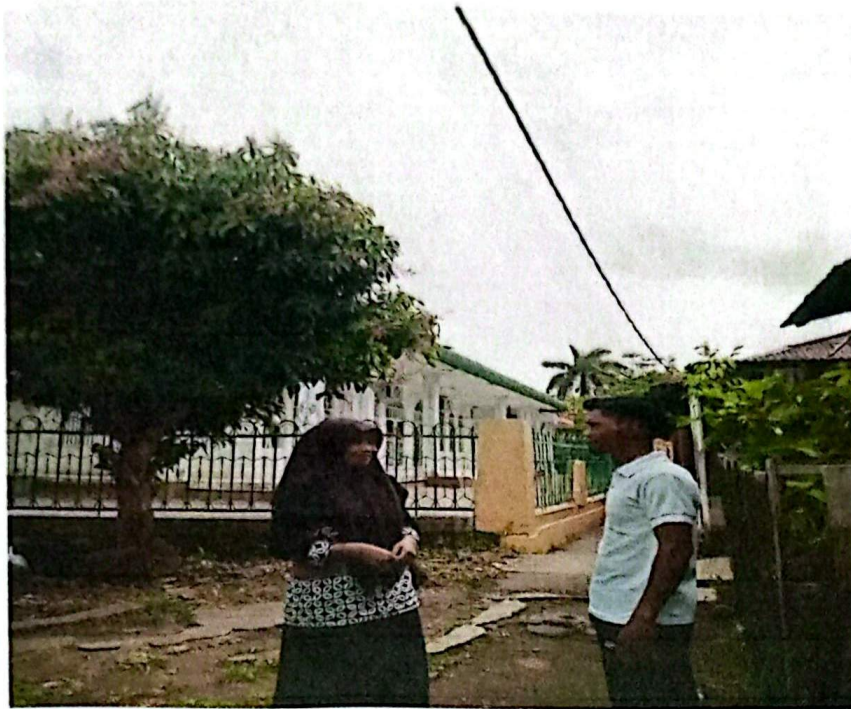


**Gambar 1.1 Wawancara dengan Anni Chaniago**



**Gambar 1.2 Wawancara dengan Gilang**





**Gambar 1.3 Wawancara dengan Agus Tanjung**



**Gambar 1.4 Wawancara dengan Zulkarnaen**





**Gambar 1.5 Wawancara dengan Rahmawati**



**Gambar 1.6 Wawancara dengan Adelia Koto**





**Gambar 1.7 Wawancara dengan Imran**



**Gambar 1.8 Wawancara dengan Yuliani**





**Gambar 1.9 Wawancara dengan Siti**



**Gambar 2.0 Wawancara dengan Junaidi**





**Gambar 2.1 Wawancara dengan Diana \**